



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



 **LAKIN**

2022

LAPORAN KINERJA

BBPPKS DI BANDUNG

H A D I R

HUMANS ADAPTIF DEDIKATIF INKLUSIF RESPONSIF



2022

**LAPORAN
KINERJA**

BBPPKS DI BANDUNG



HUMANS ADAPTIF DEDIKATIF INKLUSIF RESPONSIF



Foto cover:

Gedung Kantor BBPPKS Di Bandung

Optimalisasi visi dan misi BBPPKS Bandung itu didukung oleh motto Dzikir, Pikir, Ukir.

- Dzikir mengandung arti pada setiap kegiatan harus selalu mengingat Allah SWT.
- Pikir, itu bermakna perkara apa yang dilakukan harus sesuai aturan.
- Ukir, ikhtiar kemampuan mewujudkan hasil terbaik.

Doc : Humas BBPPKS Di Bandung

KATA PENGANTAR

Tahun 2022, BBPPKS Di Bandung menghadapi beberapa tantangan besar dalam menjalankan tugas dan fungsi setelah terbitnya Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Sosial No. 221/HUK/2022. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konvergensi program Kementerian Sosial untuk menangani masalah sosial.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja. Pada tahun 2022, BBPPKS menetapkan 3 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja yang menggambarkan upaya mencapai tujuan, yaitu: Meningkatnya kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial, Meningkatnya Kualitas Lembaga Kesos, Meningkatnya kualitas penyelenggara diklat yang mendukung pencapaian kecakapan hidup penerima manfaat, Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Manajemen yang Baik.

Hasil kinerja ini merupakan wujud kerja BBPPKS Di Bandung selama setahun dan upaya BBPPKS Di Bandung dalam memberikan layanan peningkatan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, pemenuhan respon atas kasus yang dialami masyarakat dan bentuk dukungan manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsi. Oleh karena, perlu upaya kembali untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik dan diharapkan dapat mempercepat penyelenggaraan sosial di wilayah kerja BBPPKS Di Bandung

Bandung Barat, Desember 2022
Kepala BBPPKS Di Bandung

Toto Restuanto Sembodo



"Hasil kinerja ini merupakan wujud kerja BBPPKS Di Bandung selama Tahun 2022 dan upaya BBPPKS Di Bandung dalam memberikan layanan peningkatan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, pemenuhan respon atas kasus yang dialami masyarakat dan bentuk dukungan manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsi."



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEWIRAUSAHAAN

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 510 KPM
PKH/BPNT yang tersebar di 17 kabupaten/kota

1. Sentra Mulya Jaya di Kota Jakarta Timur
2. Kab Bogor
3. Kab Sukabumi
4. Kab Cianjur
5. Kab Subang
6. Kab Majalengka
7. Kab Bandung Barat
8. Kab Ciamis
9. Kab Garut

10. Kab Tangerang
11. Kab Kuningan
12. Kab Cirebon
13. Kab Sumedang
14. Kab Karawang
15. Kota Tasikmalaya
16. Kota Bekasi
17. Kab Purwakarta

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

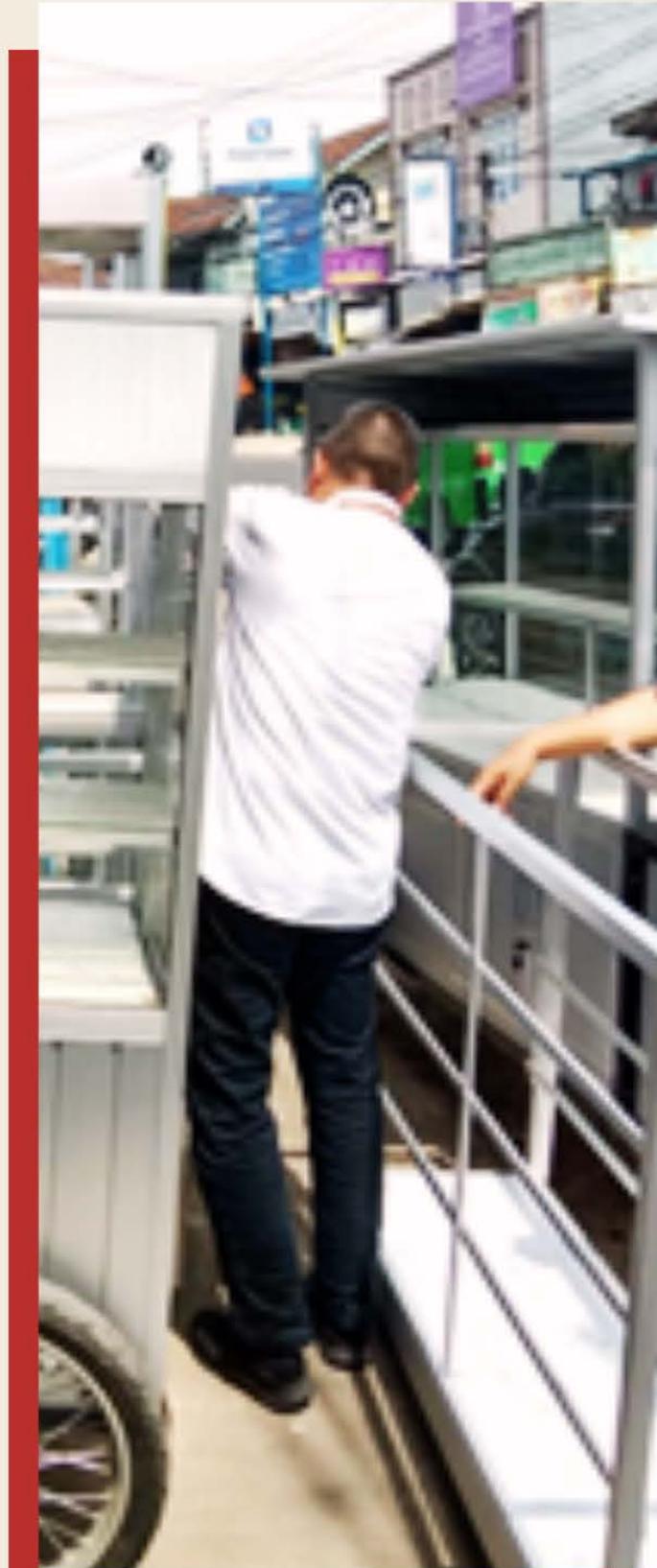
Kami telah mereviu Laporan Kinerja BBPPKS Di Bandung untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Sosial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas

Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023
Inspektur Bidang Penunjang

Idit Supriadi Priatna



RINGKASAN EKSEKUTIF

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya Taraf Kesejahteraan, Kualitas dan Keberlangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak Mampu

Presentase Penerima Pelayanan ATENSI yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi

Target	100
Presentase	
Realisasi	100
(Presentase)	

SASARAN STRATEGIS

2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan Publik

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat

Target	97
Presentase	
Realisasi	100
(Presentase)	

Persentase (%) Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesejahteraan Sosial) yang memiliki Sertifikat Pendidikan, Kediklatan dan Profesi

Target	80
Presentase	
Realisasi	96,11
(Presentase)	

RINGKASAN EKSEKUTIF

SASARAN STRATEGIS

2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan Publik

Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi

Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

Target Presentase **73**
Realisasi (Presentase) **98,93**

Target Presentase **97**
Realisasi (Presentase) **100**

SASARAN STRATEGIS

3

Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatkan Efektivitas Birokrasi

Nilai SAKIP BBPPKS Di Bandung

Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BBPPKS Di Bandung

Target Nilai **80***
Realisasi Nilai **80,26**

Target Nilai **90**
Realisasi Nilai **92,80**

Tahun 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun Anggaran 2022 BBPPKS Di Bandung telah mengalami beberapa revisi. Revisi ini dilakukan Terkait dengan refocusing anggaran akibat adanya perubahan SOTK dan Nomenklatur

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

PAGU

3,399,278,000

REALISASI

3,344,920,847

PROSENTASE

98.40

PAGU

6,991,098,000

REALISASI

6,715,820,257

PROSENTASE

96.06

TOTAL PAGU

10,390,376,000

TOTAL BELANJA

10,060,741,104

PROSENTASE

96.83

Pelatihan masyarakat penyintas di tenda pengungsian Desa Nagrak, Desa Selawi, Desa Cugenang dan Kecamatan Warung Kondang - Kabupaten Cianjur





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Terkait dengan hal tersebut, unit Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja yang telah dicapai kepada unit Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Oleh karena itu, BBPPKS Di Bandung sebagai unit Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja setiap tahun berkewajiban melaporkan capaian kinerja kepada unit Akuntabilitas Kinerja Organisasi dalam hal ini, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof).

A.1 Penjelasan atas SOTK Satker Lama

BBPPKS Bandung dibentuk berdasarkan **Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003** tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan sebagai unit eselon II, dan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial. Peran utama BBPPKS Bandung adalah kepada pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial bagi tenaga Kesejahteraan Sosial pemerintah dan masyarakat, pengkajian dan penyiapan standarisasi pendidikan dan pelatihan, pemberian informasi serta koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.2 Kegiatan Satker Lama

Dalam mengimplementasikan peran tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 Pasal 3, BBPPKS melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program dan evaluasi, serta penyusunan laporan, pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial;
2. Penyiapan pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial;
3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;



4. Pelaksanaan advokasi dan pemberian informasi pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial;
5. Pengkajian dan penyiapan informasi pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial; dan
6. Pengelolaan tata usaha

A.3 Realisasi

Pada tahun Anggaran 2022, BBPPKS Bandung telah mengalami beberapa revisi. Revisi ini dilakukan Terkait dengan *refocusing* anggaran akibat adanya perubahan SOTK dan Nomenklatur.

Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2022 antara satker lama (369084) dengan satker baru (690550), terjadi pada tabel di bawah ini.

Tabel A.1
Realisasi Anggaran Tahun 2022
Satker Lama (369084)

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Sisa (Rp)
Pegawai	7,048,591,000	7,042,386,057	99.91%	6,204,943
Barang	3,607,377,000	3,567,433,993	98.89%	39,943,007
Modal	-	-	-	-
Jumlah	10,655,968,000	10,609,820,050	99.57%	46,147,950

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN Tanggal 30 September 2022

Tabel A.2
Realisasi Anggaran Tahun 2022
Satker Baru (690550)

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Sisa (Rp)
Pegawai	3,399,278,000	3,344,920,847	98.40%	54,357,153
Barang	6,991,098,000	6,715,820,257	96.06%	275,277,743
Modal	-	-	-	-
Jumlah	10,390,376,000	10,060,741,104	96.83%	329,634,896

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN Tanggal 31 Desember 2022



B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 02 Februari tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang menetapkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sehingga Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam mengimplementasikan peran tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, BBPPKS melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial aparatur dan masyarakat
- c. Pelaksanaan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
- d. Pelaksanaan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan masyarakat
- e. Pelaksanaan pengendalian mutu Pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial
- f. Pelaksanaan advokasi dan asistensi serta Kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
- h. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, BBPPKS menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 221/HUK/2022 tentang Sentra Layanan Sosial Pada Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Dan Pengembangan Profesi tanggal 24 Oktober Tahun 2022 sebagaimana dimaksud sebagai berikut :



- a. Rehabilitasi Sosial : Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) :
 1. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
 2. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
 3. dukungan keluarga;
 4. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;
 5. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan;
 6. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
 7. dukungan aksesibilitas.
- b. Pemberdayaan Sosial :
 1. rujukan pemberdayaan masyarakat;
 2. rujukan program kewirausahaan sosial/pahlawan ekonomi nusantara;
 3. rujukan program sembako; dan/atau
 4. dukungan *community centre*.
- c. Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 1. rujukan program keluarga harapan;
 2. penyiapan dan penyaluran logistik bencana;
 3. penanganan bencana; dan/atau
 4. rujukan dan dukungan program rumah sejahtera terpadu.
- d. Manajemen Kasus ;
 1. respon kedaruratan; dan/atau
 2. verifikasi dan validasi data terpadu Kesejahteraan Sosial.
- e. Sertifikasi ; asesmen untuk sertifikasi sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- f. Akreditasi ; asesmen untuk akreditasi lembaga Kesejahteraan Sosial
- g. Sentra Kreasi Atensi ;
 1. agrowisata;
 2. kuliner;
 3. *workshop*;
 4. perdagangan;
 5. *handycraft*;
 6. karya seni;
 7. jasa;
 8. tata boga;
 9. konveksi;



10. pelatihan;
11. rekreasi;
12. olahraga;
13. daur ulang sampah;
14. jasa ruang kerja (*co-working place*);
15. ruang pameran (*showroom*); dan/atau
16. sarana dan prasarana lain.

Pelaksanaan fungsi layanan lainnya di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan pada Instalasi Layanan Sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Pembentukan dan jumlah sumber daya yang terlibat dalam penyelenggaraan Instalasi Layanan Sosial ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial melaporkan hasil pelaksanaan tugas Instalasi Layanan Sosial kepada Menteri Sosial melalui Kepala Pusdiklatbangprof dan ditembuskan kepada pimpinan unit kerja eselon I sesuai tugas dan fungsi. Pembentukan Layanan Instalasi Sosial dapat dilakukan pembaharuan dan penetapan kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui pemantauan dan evaluasi. Seluruh pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Anggaran BBPPKS dan DIPA Unit Kerja Eselon I lainnya di lingkungan kementerian sosial.

Pelaksanaan fungsi layanan lainnya di lingkungan BBPPKS Di Bandung sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan pada Instalasi Layanan Sosial di BBPPKS di Bandung. Pembentukan dan jumlah sumber daya yang terlibat dalam penyelenggaraan Instalasi Layanan Sosial ditetapkan oleh Kepala BBPPKS di Bandung.

Kepala BBPPKS di Bandung menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Instalasi Layanan Sosial kepada Menteri Sosial melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi dan ditembuskan kepada pimpinan unit kerja Eselon I sesuai tugas dan fungsi.

Pembentukan Instalasi Layanan Sosial dapat dilakukan pembaharuan dan penetapan kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui pemantauan dan evaluasi.



C. Aspek Strategis Organisasi

Peran ini sangat strategis mengingat tugas Kementerian Sosial sebagaimana Perpres Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial Pasal 3 huruf (h) tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan Kesejahteraan Sosial, serta penyuluhan sosial, yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (pasal 23 ayat 1 dan 2). Tugas dan fungsi Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial tercantum dalam pasal 24 dan 25. Dalam pasal 25 huruf b tercantum fungsi untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial yang merupakan tugas BBPPKS Di Bandung.



Gambar C.1

Peran Strategis BBPPKS Di Bandung

Untuk mengimplementasikan peran strategis ini, maka BBPPKS Di Bandung berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis BBPPKS Periode 2022 – 2024. Hal ini sesuai dengan amanat UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan peraturan pelaksanaan perencanaan pembangunan yaitu PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta peraturan teknis penyusunan renstra yaitu Peraturan Menteri PPN / Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2022 – 2024.

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi organisasi

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial baik aparatur dan non aparatur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan pembangunan / pemerintah bidang Kesejahteraan Sosial ke depan memiliki tantangan yang semakin berat. Dalam menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial guna meningkatkan profesionalitas SDM Kesejahteraan Sosial dimaksud.



Pendidikan dan Pelatihan adalah jenis pendidikan non formal yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 1). Terkait dengan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan SDM Kesejahteraan Sosial yang terampil, kreatif, inovatif dan adaptif perlu ditingkatkan melalui pelatihan.

Kebutuhan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi yang di DIPA sampai 2024 berjumlah 2.000.000 orang (Rancangan Teknokrasi RPJMN 2022 – 2024: 99). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan dan pelatihan vokasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Kesejahteraan Sosial yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter sebagaimana tertuang dalam agenda RPJMN 2022-2024.

Di samping itu, dengan adanya perubahan kebijakan penyetaraan jabatan administrator dan pengawas ke dalam jabatan fungsional, maka aspirasi masyarakat pada pelatihan jabatan fungsional, baik pelatihan penjenjangan maupun pelatihan teknis perlu diapresiasi.

E. Struktur Organisasi

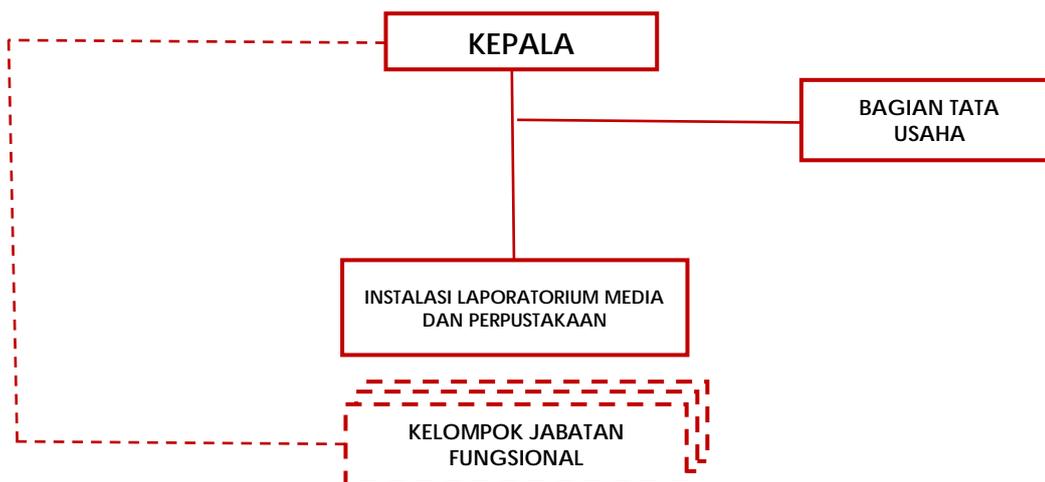
Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik bidang pendidikan dan pelatihan, BBPPKS Di Bandung memiliki susunan organisasi sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Adapun susunan organisasi BBPPKS Di Bandung, sebagai berikut :

- a. Kepala Balai Besar
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi BBPPKS Di Bandung, sebagaimana bagan di bawah ini.



Bagan 1.1 Struktur Organisasi BBPPKS Di Bandung



(Sumber : Bagian Kepegawaian BBPPKS Di Bandung Desember 2022)

F. Sumber Daya Aparatur

BBPPKS Di Bandung mempunyai Sumber Daya Aparatur (SDA) berjumlah 75 orang, meliputi 2 orang sebagai Pejabat Struktural, 42 orang sebagai Pejabat Fungsional Tertentu, dan 31 orang sebagai pelaksana.

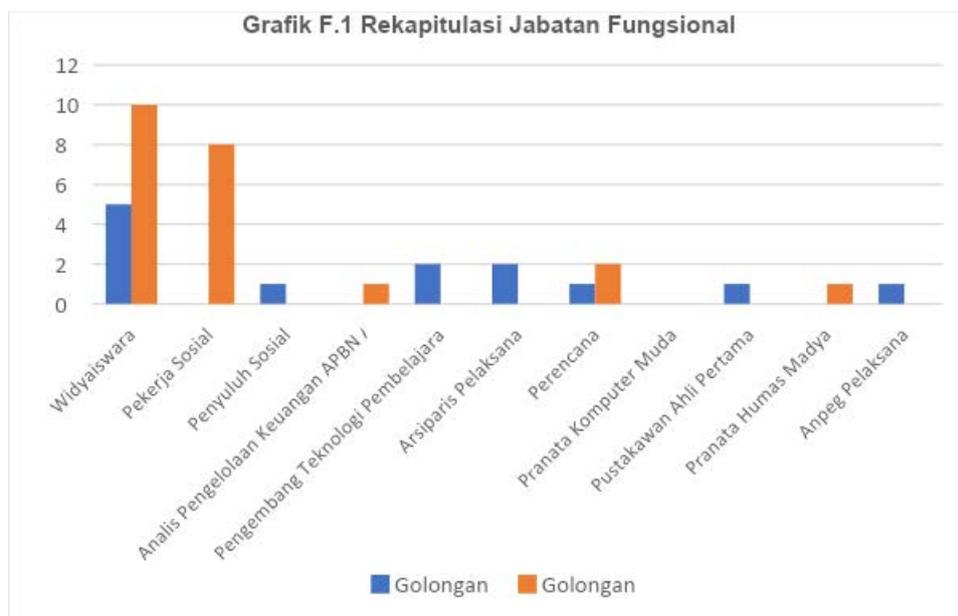
Di samping jabatan struktural di atas, BBPPKS Di Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung pula oleh jabatan fungsional. Jabatan fungsional di lingkungan BBPPKS Di Bandung dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu: kelompok *operating core* dan kelompok *technostructure*. *Operating core* adalah jabatan yang melakukan tugas pokok organisasi yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Pada BBPPKS Di Bandung yang termasuk kelompok *operating core* adalah Widyaiswara (WI).

Kemudian *technostructure* adalah bagian organisasi yang berperan sebagai analis, yang mempengaruhi bagian dari organisasi. Kelompok *technostructure* adalah para pejabat fungsional tertentu di luar Widyaiswara. Adapun komposisi jabatan fungsional di BBPPKS Di Bandung, tergambar pada grafik di bawah ini.



Tabel F.1 Rekapitulasi Jabatan Fungsional

No Urut	Jabatan Fungsional Khusus	Golongan			Keterangan
		II	III	IV	
1.	Widyaiswara	-	4	9	
2.	Pekerja Sosial	-	1	11	
3.	Penyuluh Sosial	-	1	-	
4.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	-	-	1	Penyetaraan
5.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	-	2	2	Penyetaraan
6.	Arsiparis Pelaksana	-	2	-	
7.	Perencana	-	1	2	Penyetaraan
8.	Pranata Komputer Muda	-	-	-	
9.	Pustakawan Ahli Pertama	-	1	-	
10.	Pranata Humas Madya		-	1	
11.	Analisis Kepegawaian	-	1	2	Penyetaraan
12.	Analisis Kebijakan	-	-	1	Penyetaraan
	Jumlah	0	13	29	



(Sumber : Bagian Kepegawaian BBPPKS Di Bandung Desember 2022)



Tabel F.2 Rekapitulasi Jabatan Fungsional Umum

No Urut	Jabatan Fungsional Umum	Golongan			Keterangan
		II	III	IV	
1.	Analisis Pengelola BMN	-	1	1	
2.	Pengelola Barang Persediaan dan BMN	-	1	-	
3.	Pengelola Administrasi Kepegawaian	-	2	-	
4.	Pengelola Asrama	-	1	-	
5.	Pengadministrasi Umum	1	-	-	
6.	Teknisi Listrik dan Bangunan	-	-	-	
7.	Pemelihara Sapro Kantor	1	-	-	
8.	Bendahara Penerimaan	1	-	-	
9.	Bendahara Pengeluaran	-	1	-	
10.	Penyusun Laporan Keuangan	-	1	1	
11.	Verifikator Keuangan	1	-	-	
12.	Pengadministrasi Keuangan	-	1	-	
13.	Analisis Kebutuhan Diklat	-	1	-	
14.	Penyusun Program dan Anggaran	-	2	-	
15.	Pengelola Evaluasi dan Pelaporan	-	2	-	
16.	Pengelola Dokumentasi	1	4	-	
17.	Analisis Pemantauan dan Evaluasi	-	1	-	
18.	Penyusun Bahan Penyelenggaraan Diklat	-	-	1	
19.	Pengolah Data Penyelenggaraan Diklat	-	3	-	
20.	Koordinator Instalasi Perpustakaan			1	
21.	Pengelola Kehumasan	-	-	1	
	Jumlah	5	21	5	

(Sumber : Bagian Kepegawaian BBPPKS Di Bandung Desember 2022)



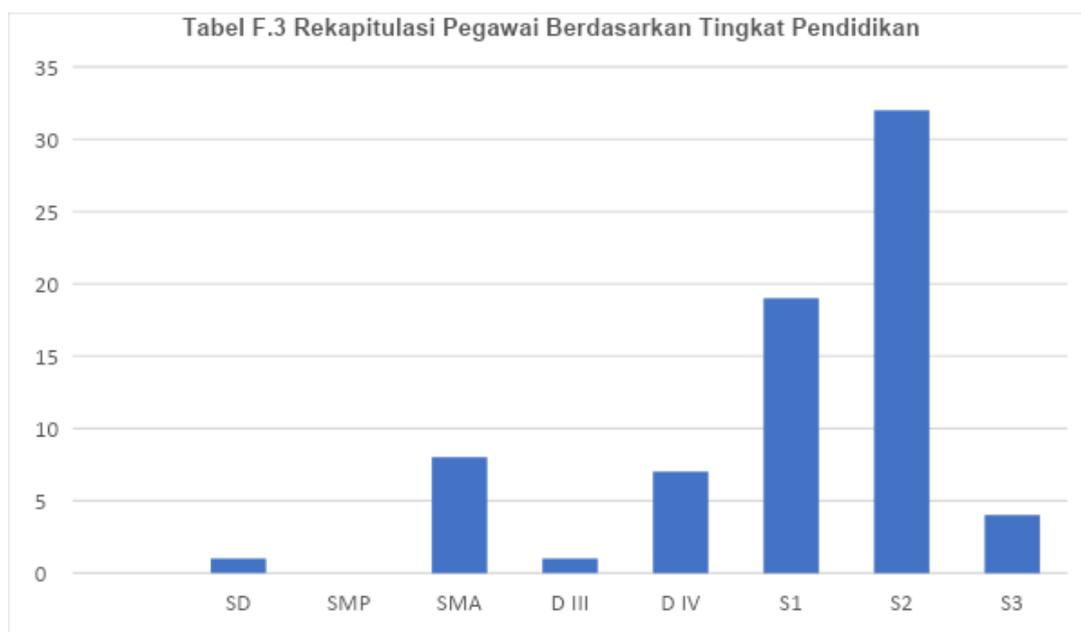
(Sumber : Bagian Kepegawaian BBPPKS Di Bandung Desember 2022)

Sumber Daya Aparatur BBPPKS Di Bandung berdasarkan pendidikan, meliputi yang berpendidikan S3 berjumlah 4 orang, S2 berjumlah 32 orang, S1 berjumlah 19 orang, D4 berjumlah 7 orang D3 berjumlah 1 orang, SLTA berjumlah 8 orang dan SD berjumlah 1 orang, sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini :

Tabel F.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

URAIAN	POSISI AWAL	TAMBAH	KURAN G	POSISI AKHIR	%
Menurut Pendidikan					
S3	4	-	-	4	6
S2	36	-	-	36	44
S1	20	-	-	20	26
D IV	8	-	-	8	10
Sarmud / D3	1	-	-	1	1
SLTA	6	-	-	6	11
SLTP	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	1
Jumlah	75	-	-	75	100

(Sumber : Bagian Kepegawaian BBPPKS Di Bandung Desember 2022)



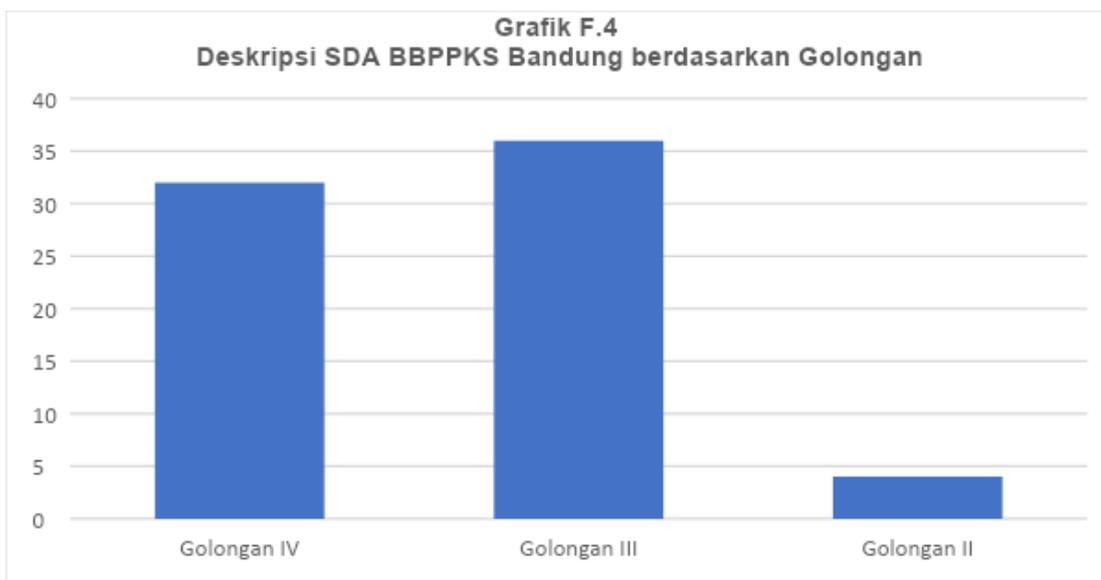
(Sumber : Bagian Kepegawaian BBPPKS Di Bandung Desember 2022)

Selanjutnya jenjang golongan SDA BBPPKS Di Bandung terdiri dari golongan IV berjumlah 32 orang, golongan III berjumlah 36 orang dan golongan II berjumlah 4 orang dari total 72 pegawai atau sekitar 30,8% sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Tabel F.4
Deskripsi SDA BBPPKS Di Bandung berdasarkan Golongan

URAIAN	POSISI AWAL	TAMBAH	KURANG	POSISI AKHIR	%
II. Menurut Golongan					
Golongan IV	37	-	-	37	44
Golongan III	35	-	-	35	50
Golongan II	3	-	-	3	6
Jumlah	75	-	-	75	100

(Sumber : Bagian Kepegawaian BBPPKS Di Bandung Desember 2022)



(Sumber : Bagian Kepegawaian BBPPKS Di Bandung Desember 2022)

G. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana merupakan aset organisasi yang tidak kalah pentingnya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. BBPPKS Di Bandung sebagai organisasi publik pendidikan dan pelatihan, mempunyai sarana dan prasarana sebagaimana deskripsi pada tabel di bawah ini.

Tabel G.1
Deskripsi Sarana dan Prasarana BBPPKS Di Bandung per 31 Desember 2022

No.	Jenis Sapra	Satuan	Jumlah
A.	Tanah		
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	M2	215
2.	Tanah Bangunan Pendidikan dan latihan	M2	9.335
B.	Gedung dan Bangunan		
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	2
2.	Bangunan Gedung Pendidikan (Ruang Kelas, Ruang Widyaiswara, dan Ruang Kerja)	Unit	2
3.	Asrama	unit	3
4.	Rumah Dinas	unit	2
5.	Pos Jaga	unit	1
6.	Tempai Ibadah (Mesjid)	unit	1
7.	Perpustakaan	unit	1
8.	Rumah Genset	unit	1
9.	Ruang Makan dan Lab Peksos	unit	1
B.	Kendaraan Bermotor		
1.	Micro Bus	unit	2
2.	Mini Bus	unit	7
3.	Sepeda Motor	unit	2
C.	Peralatan dan Mesin		
1.	Stationary Generating Set	unit	1
2.	Portabel Water Pump	unit	5
3.	Sumersible Pump	unit	1
4.	Pompa Air	unit	2



No.	Jenis Sapra	Satuan	Jumlah
5.	Maintenance Data & Komunikasi	unit	1
6.	Memori Programmer	unit	1
7.	Mesin Ketik Manual Portabel	unit	1
8.	Mesin Hitung Listrik	unit	1
9.	Mesin Fotocopy Double Folio	unit	1
10.	Lemari Besi / Metal	unit	8
11.	Lemari Kayu	unit	177
12.	Rak Besi	unit	3
13.	Rak Kayu	unit	4
14.	Filling Cabinet Besi	unit	14
15.	Brankas	unit	3
16.	Buffet	unit	2
17.	Hydrant	unit	1
18.	CCTV	unit	7
19.	Papan visual	unit	4
20.	Alat Penghancur Kertas	unit	1
21.	Overhead projector	unit	6
22.	LCD Projector	unit	14
23.	Flip Chart	unit	4
24.	Layar LCD Projector	unit	6
25.	Papan Pengumuman	unit	4
26.	Meja Kayu Kerja / Belajar	unit	222
27.	Kursi Besi / Metal	unit	354
28.	Kursi Kayu	unit	150
29.	Sice	unit	31
30.	Meja Rapat	unit	5
31.	Meja Komputer	unit	5
32.	Tempat Tidur Kayu	unit	112
33.	Meja Resepsionis	unit	2
34.	Kasur / Spring Bed	unit	249
35.	Meja Makan Kayu	unit	39
38.	Partisi	unit	1
39.	Nakas	unit	162
40.	Mesin Penghisap Debu	unit	4
41.	Mesin Pemotong Rumput	unit	6
42.	Mesin Cuci	unit	6
43.	Lemari Es	unit	10
44.	Exhaust Fan	unit	13
45.	Kompor Gas	unit	4
46.	Rice Warmer	unit	3
47.	Kitchen Set	unit	5
48.	Toa	unit	5
49.	Thermos Air	unit	2
50.	Alat Dapur Lainnya	unit	5
51.	Televisi	unit	87
52.	Amplifier	unit	4
53.	Equalizer	unit	2
54.	Loudspeaker	unit	24
55.	Sound System	unit	11
56.	Wireless	unit	10
57.	Microphone	unit	6
58.	Microphone Tabel Stand	unit	3
59.	Mic Conference	unit	20
60.	Unit Power Supply	unit	2
61.	Dispenser	unit	11
62.	Mimbar Podium	unit	2
63.	Handycam	unit	2
64.	Heater (Lata Rumah Tangga Lainnya)	unit	22



No.	Jenis Sapra	Satuan	Jumlah
65.	Audio Mixing Portable & Stasioner	unit	2
66.	Audio Amplifier	unit	4
67.	Audio Video Selector	unit	1
68.	Audio Patch Panel	unit	1
69.	Compact Disc Player	unit	1
70.	Audio Visual	unit	1
71.	Microphone / Wireless Mic	unit	13
72.	Bloom Stand	unit	4
73.	Power Supply Microphone	unit	1
74.	Audio Announcer desk	unit	1
75.	Power Amplifier	unit	4
76.	Chairman / Audio Conference	unit	2
77.	Audio Tape Reel Recorder	unit	2
78.	Digital LED Running Text	unit	2
70.	Water Heater	unit	11
71.	Camera Digital	unit	13
72.	Video Conference	unit	1
73.	LCD Monitor	unit	1
74.	On Air Recording	unit	1
75.	PABX	unit	2
76.	IP PBX	unit	1
77.	Alat Komunikasi Radio UHF	unit	1
78.	Bracket Holder	unit	58
79.	Celling Operating Lamp 7 M Halogen	unit	1
80.	Rowing Machine	unit	1
81.	Tread Mill Treatment	unit	2
82.	Sepeda Statis	unit	4
83.	Portabel Router	unit	1
84.	Personal Computer	unit	15
85.	Fire Extinguisher	unit	1
86.	UPS	unit	26
87.	Local Area Network (LAN)	unit	30
88.	P.C Unit	unit	78
89.	Laptop	unit	53
90.	Net Book	unit	1
91.	Scanner	unit	6
92.	Printer	unit	95
93.	Server	unit	6
94.	Router	unit	3
95.	Repeater and Tranciever	unit	1
96.	Rak Server	unit	1
97.	Firewell	unit	1
98.	Wireless Access Point	unit	2
99.	Switch	unit	7
100.	AC	unit	15
101.	Monografi	Buku	2.731
102.	Alat Musik	unit	1
103.	Software Komputer	unit	2

(Sumber : Aplikasi SIMAN BBPPKS Di Bandung Desember 2022)



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam Renstra digambarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program / kegiatan dengan memperhatikan lingkungan strategis.

1. Visi

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, maka BBPPKS Di Bandung memiliki peran strategis dalam mewujudkan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang unggul melalui pendidikan dan pelatihan.

BBPPKS Di Bandung sebagai unit eselon II, mendukung penuh upaya pencapaian visi Pusdiklatbangprof, yaitu menjadi unit Kementerian Sosial RI yang akuntabel dan kredibel dalam mewujudkan SDM penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang unggul dan kelembagaan bidang Kesejahteraan Sosial yang profesional. Seiring dengan visi Pusdiklatbangprof, maka BBPPKS Di Bandung menetapkan visi untuk periode 2022-2024, yaitu: **MEWUJUDKAN SDM PENYELENGGARA Kesejahteraan Sosial YANG UNGGUL DAN KREATIF.**

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, BBPPKS Di Bandung menetapkan misi, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Kompeten
- b. Meningkatkan Tata Kelola Lembaga dalam Pelayanan Kediklatan yang Efektif dan Efisien
- c. Meningkatkan Kompetensi Penyelenggara Diklat Kesejahteraan Sosial.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pusdiklatbangprof, BBPPKS Di Bandung harus mendukung penuh pencapaian visi dan misi tersebut. Untuk deskripsi lebih rinci dituangkan kedalam Tujuan, Sasaran Strategis dan Nilai-Nilai Organisasi, Tugas dan Fungsi.



3. Tujuan

Mengacu pada tujuan Pusdiklatbangprof tahun 2022-2024 yaitu Mewujudkan SDM penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang unggul dan kelembagaan bidang Kesejahteraan Sosial yang profesional, maka BBPPKS Di Bandung memiliki tujuan mewujudkan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang unggul dan Kreatif serta meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas terdapat beberapa indikator yaitu :

1. Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kualitas Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial)
 - a. Persentase (%) Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial
 - b. Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki Sertifikat Pelatihan
 - c. Persentase (%) Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesejahteraan Sosial) yang Tersertifikasi
 - d. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi
2. Meningkatnya Layanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - a. Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

4. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan lima tahun kedepan BBPPKS Di Bandung menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode tahun 2022-2024, yaitu:

SASARAN/INDIKATOR	
SS 1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas dan Kelangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu
IKSS 1	(%) Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas dan Kelangsungan Hidupnya
	SP 1 Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar
	IKP 5 (%) Penerima Pelayanan ATENSI yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi



SASARAN/INDIKATOR	
SS 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan Publik
IKSS 2	(%) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional
IKSS 3	(%) Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian <i>Life Skill Training</i> bagi Penerima Manfaat
	SP 5 Meningkatkan Profesionalitas Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
IKP 1	(%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar Kompetensi
IKP 5	(%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial serta mempunyai Kinerja yang baik
	SK 1 Meningkatkan SDM Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Sesuai Standar
IKK 1	(%) Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesejahteraan Sosial) yang memiliki Sertifikat Pendidikan, Kediklatan dan Profesi
IKK 3	(%) Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial kepada Penerima Manfaat
	SK 2 Meningkatkan Kualitas Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial
IKK 3	(%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi
	SK 5 Meningkatkan Kapasitas SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
IKK 1	(%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
IKK 2	(%) Alumni Politeknik Kesejahteraan Sosial yang bekerja di bidangnya
	SP 6 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Diklat dalam Meningkatkan Life Skill Penerima Manfaat
IKP	(%) Penyelenggaraan Diklat yang mendukung Pencapaian <i>Life Skill Training</i> bagi Penerima Manfaat
	SK Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Diklat bagi Penerima Manfaat
IKK	(%) Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian <i>Life Skill Training</i> bagi Penerima Manfaat
SS 3	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatkan Efektivitas Birokrasi
IKSS 1	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kementerian Sosial
IKSS 2	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial
	SP 8 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kementerian Sosial



SASARAN/INDIKATOR			
	IKP 1	Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Sekretariat Jenderal	
	SK 1	Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Sekretaris Jenderal	
	IKK 8	Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	

Catatan:

- SS : Sasaran Strategis
IKSS : Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SP : Sasaran Program
IKP : Indikator Kinerja Program
SK : Sasaran Kegiatan
IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

4.1 Nilai-Nilai Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPPKS Di Bandung sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus memiliki nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi (*organizational values*) merupakan kekuatan fundamental yang menentukan kesuksesan suatu organisasi. Tanpa adanya pemahaman nilai-nilai organisasi dalam visi dan misi maka organisasi akan mengalami ketidakteraturan dan ketidakjelasan pencapaian tujuan.

Nilai-nilai organisasi ini merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2022 tentang Nilai-Nilai Kementerian Sosial, meliputi:

- Humanis, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu menggunakan pendekatan humanis dalam bekerja.
- Adaptif yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam penggunaan program kerja dirancang agar mudah beradaptasi di segala kondisi.
- Dedikatif, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu senantiasa bekerja penuh dedikatif tidak sekedar bisnis seperti biasa.
- Inklusif, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu bekerja dalam konsep melibatkan semua pemangku kepentingan dan selalu berfikir secara out of the box.



- e. Responsif, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam melaksanakan program harus memiliki keterdesakan / *sense of urgency* yang tinggi serta berupaya untuk selalu cepat tanggap.

Nilai-nilai Kementerian Sosial tersebut kemudian disosialisasikan dengan mempergunakan tagline “**#KEMENSOS Hadir**”

5. Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBPPKS Di Bandung, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level Pusdiklatbangprof, Kementerian Sosial dan Nasional, maka BBPPKS Di Bandung menetapkan kegiatan-kegiatan yang memiliki tujuan. Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara objektif oleh BBPPKS Di Bandung dan mencerminkan pengaruh atas pencapaian hasil (*output*) kegiatan.

5.1 Kegiatan Teknis

Dalam mengimplementasikan peran tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, BBPPKS melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial aparatur dan masyarakat
- c. Pelaksanaan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
- d. Pelaksanaan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan masyarakat
- e. Pelaksanaan pengendalian mutu Pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial
- f. Pelaksanaan advokasi dan asistensi serta Kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
- h. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha



5.2 Kegiatan Generik (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya)

Kegiatan Generik (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya) adalah kegiatan yang bersifat memberi pelayanan internal BBPPKS Di Bandung. Kategori kegiatan generik (dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya), Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, BBPPKS menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 221/HUK/2022 tentang Sentra Layanan Sosial Pada Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Dan Pengembangan Profesi tanggal 24 Oktober Tahun 2022 sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial : Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) :
 1. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
 2. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
 3. dukungan keluarga;
 4. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;
 5. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan;
 6. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
 7. dukungan aksesibilitas.
- b. Pemberdayaan Sosial :
 1. rujukan pemberdayaan masyarakat;
 2. rujukan program kewirausahaan sosial/pahlawan ekonomi nusantara;
 3. rujukan program sembako; dan/atau
 4. dukungan *community centre*.
- c. Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 1. rujukan program keluarga harapan;
 2. penyiapan dan penyaluran logistik bencana;
 3. penanganan bencana; dan/atau
 4. rujukan dan dukungan program rumah sejahtera terpadu.
- d. Manajemen Kasus;
 1. respon kedaruratan; dan/atau



2. verifikasi dan validasi data terpadu Kesejahteraan Sosial.
- e. Sertifikasi; asesmen untuk sertifikasi sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- f. Akreditasi ; asesmen untuk akreditasi lembaga Kesejahteraan Sosial
- g. Sentra Kreasi Atensi ;
 1. agrowisata;
 2. kuliner;
 3. *workshop*;
 4. perdagangan;
 5. *handycraft*;
 6. karya seni;
 7. jasa;
 8. tata boga;
 9. konveksi;
 10. pelatihan;
 11. rekreasi;
 12. olahraga;
 13. daur ulang sampah;
 14. jasa ruang kerja (*co-working place*);
 15. ruang pameran (*showroom*); dan/atau
 16. sarana dan prasarana lain.

Pelaksanaan fungsi layanan lainnya di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan pada Instalasi Layanan Sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Pembentukan dan jumlah sumber daya yang terlibat dalam penyelenggaraan Instalasi Layanan Sosial ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial melaporkan hasil pelaksanaan tugas Instalasi Layanan Sosial kepada Menteri Sosial melalui Kepala Pusdiklatbangprof dan ditembuskan kepada pimpinan unit kerja eselon I sesuai tugas dan fungsi. Pembentukan Layanan Instalasi Sosial dapat dilakukan pembaharuan dan penetapan kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui pemantauan dan evaluasi.



Seluruh pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Anggaran BBPPKS dan DIPA Unit Kerja Eselon I lainnya di lingkungan kementerian sosial.

Pelaksanaan fungsi layanan lainnya di lingkungan BBPPKS Di Bandung sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan pada Instalasi Layanan Sosial di BBPPKS di Bandung. Pembentukan dan jumlah sumber daya yang terlibat dalam penyelenggaraan Instalasi Layanan Sosial ditetapkan oleh Kepala BBPPKS di Bandung.

Kepala BBPPKS di Bandung menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Instalasi Layanan Sosial kepada Menteri Sosial melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi dan ditembuskan kepada pimpinan unit kerja Eselon I sesuai tugas dan fungsi.

Pembentukan Instalasi Layanan Sosial dapat dilakukan pembaharuan dan penetapan kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui pemantauan dan evaluasi.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen perencanaan tahunan memuat tentang program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan berupa *inputs*, *outputs*, dan *outcomes* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya pada saat penyusunan laporan.

Rencana kinerja Tahunan (RKT) BBPPKS Di Bandung Tahun 2022 telah mengalami 2 (Dua) kali revisi. Hal ini berkaitan dengan adanya perubahan SOTK dan Nomenklatur. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPPKS Di Bandung Tahun 2022 terlampir

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan khusus dari Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,



transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah yang ditandatangani oleh Kepala BBPPKS Di Bandung dan mengalami 2 (Dua) kali revisi, hal ini berkaitan dengan adanya perubahan SOTK dan Nomenklatur (Memasukan Hasil dari Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir).

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2022 ada perbedaan antara sasaran strategis Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) BBPPKS Di Bandung, hal ini dikarenakan sasaran strategis Perjanjian Kinerja tahun 2022 BBPPKS Di Bandung mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan sasaran strategis dari Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof).

Perjanjian Kinerja BBPPKS Di Bandung hasil penyesuaian Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat (800 Orang)	97%
3.	Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi (281 Lembaga)	73%
4.	Meningkatnya SDM Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesejahteraan Sosial) yang memiliki Sertifikat Pendidikan, Kediklatan dan Profesi (2.779 orang)	80%
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup (510 Orang)	75%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6.	Terwujudnya tatakelola BBPPKS Di Bandung yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	70
7.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan BBPPKS Di Bandung	Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i> "IKM"	90

Sehubungan dengan adanya *refocusing*, optimalisasi dan realokasi anggaran Kementerian Sosial dalam penyesuaian SOTK dan nomenklatur sehingga berpengaruh terhadap volume dan pagu DIPA BBPPKS Di Bandung Tahun 2022 menjadi bertambah. Namun, untuk DIPA bertambah karena adanya penggunaan mekanisme pelatihan.

Demikian juga Perjanjian Kerja Kepala BBPPKS Di Bandung dengan Kepala Pusdiklatbangprof telah mengalami 2 (Dua) kali revisi. Hal ini berkaitan dengan adanya perubahan SOTK dan Nomenklatur. Adapun Perjanjian Kinerja BBPPKS Di Bandung Tahun 2022 terlampir.



BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BBPPKS Di Bandung dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi IKU pada masing-masing sasaran strategis. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala setiap 3 bulan melalui aplikasi *kinerjaku.kemensos.go.id* dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan kinerja yang meliputi perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu, dan perbandingan lain yang diperlukan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi kinerja dari target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Capaian kinerja tertinggi ditetapkan 120%, sehingga apabila terdapat angka capaian di atas 120% akan dihitung 120%.

Data dan informasi pengukuran dan evaluasi kinerja tertuang dalam laporan kinerja. Laporan kinerja unit kerja eselon II dan unit kerja eselon I menjadi data dan bahan dalam penyusunan laporan kinerja Kementerian Sosial yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan).

B. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Permensos nomor 19 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial, pengumpulan laporan kinerja adalah sebagai berikut :



SASARAN/INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SS 1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas dan Kelangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu			
IKSS 1	(%) Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas dan Kelangsungan Hidupnya			
SP 1	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar			
IKP 5	(%) Penerima Pelayanan ATENSI yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi		100%	100%
SS 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan Publik			
IKSS 2	(%) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional			
IKSS 3	(%) Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian <i>Life Skill Training</i> bagi Penerima Manfaat			
SP 5	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggara Kesejahteraan Sosial			
IKP 1	(%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar Kompetensi			
IKP 5	(%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial serta mempunyai Kinerja yang baik			
SK 1	Meningkatnya SDM Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Sesuai Standar			
IKK 1	(%) Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesejahteraan Sosial) yang memiliki Sertifikat Pendidikan, Kediklatan dan Profesi (800 Orang)		97%	103,09%



SASARAN/INDIKATOR			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	IKK 3	(%) Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial kepada Penerima Manfaat			
	SK 2	Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial			
	IKK 3	(%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi (281 LKS)	73%	98,93%	120%
	SK 5	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial			
	IKK 1	(%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (2.779 Orang)	80%	96,11%	120%
	IKK 2	(%) Alumni Politeknik Kesejahteraan Sosial yang bekerja di bidangnya			
	SP 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat dalam Meningkatkan Life Skill Penerima Manfaat			
	IKP	(%) Penyelenggaraan Diklat yang mendukung Pencapaian <i>Life Skill Training</i> bagi Penerima Manfaat			
	SK	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat bagi Penerima Manfaat			
	IKK	(%) Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian <i>Life Skill Training</i> bagi Penerima Manfaat (510 Orang)	75%	100%	120%
SS 3	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektivitas Birokrasi				
IKSS 1	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kementerian Sosial		90	92,80	103,11
IKSS 2	Nilai SAKIP Kementerian Sosial		77	80,26*	104,23*



SASARAN/INDIKATOR			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SP 8	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kementerian Sosial				
IKP 1	Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Sekretariat Jenderal				
	SK 1	Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Sekretaris Jenderal			
	IKK 8	Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi			

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas dan Kelangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu

Sasaran strategis "Meningkatnya taraf Kesejahteraan Sosial penduduk miskin dan rentan" terkait dengan tugas Kementerian Sosial dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur melalui satu indikator kinerja, yaitu: Indeks Kesejahteraan Sosial. Sasaran strategis ini didukung/dilaksanakan oleh Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Ditjen Pemberdayaan Sosial. Berikut ini adalah Indikator Kinerja, Target, Realisasi serta Capaian BBPPKS Di Bandung.

**Tabel C.1.1 Sasaran Strategis
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan**

No.	Indikator Kinerja	2022			2021
		Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
1.	(%) Penerima Pelayanan ATENSI yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100%	100%	100%	-
Capaian Sasaran Strategis 1				100%	-

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 01 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial menerangkan bahwa tugas dari Kementerian sosial yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang



sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Kementerian Sosial menyelenggarakan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial.

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Di Bandung merupakan unit teknis di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah Pusdiklatbangprof memiliki fungsi memberikan pelatihan kepada masyarakat maupun pegawai pemerintah dan menjalankan kebijakan pimpinan.

Dengan permasalahan sosial yang semakin kompleks BBPPKS Di Bandung melalui kebijakan Menteri Sosial melaksanakan kegiatan Respon Kasus. Hal ini ditujukan untuk mempercepat penanganan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Respon Kasus juga akan memudahkan Kementerian Sosial dalam menjangkau permasalahan yang ada. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maka dibentuklah website *siksc.kemensos.go.id* dengan tujuan untuk memudahkan penanganan kasus sesuai dengan wilayah kerja satker di seluruh Indonesia.

BBPPKS Di Bandung sudah memulai melakukan Respon kasus dari tahun 2022 dengan kasus yang tersebar di wilayah kerja BBPPKS Di Bandung. Hal ini sesuai dengan Kepmensos No. 221/HUK/2022 tentang Sentra Layanan Sosial pada BBPPKS, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan Pusdiklatbangprof. Dengan adanya peraturan baru tersebut maka BBPPKS Di Bandung mengalami penambahan fungsi sebagai sentra layanan.

Jumlah respon kasus yang masuk ke BBPPKS Di Bandung pada tahun 2022 yaitu sebanyak 39 kasus yang tersebar di 8 (delapan) kabupaten dan kota dan 2 (dua) Provinsi yaitu Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Semua kasus yang masuk sudah selesai ditangani oleh Tim BBPPKS Di Bandung baik itu dilakukan secara mandiri maupun kolaborasi dengan satker lain. Respon kasus yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Pelayanan yang dilakukan bisa berupa asesmen, rujukan, terapi, pemberian motivasi, pemberian bantuan, mencari *networking*, menjadi penghubung dengan stakeholder terkait dan lain-lain.

BBPPKS Di Bandung melakukan respon kasus target 100% dapat tertangani. Setiap kasus yang masuk ke *command center* langsung di respon dengan cepat dengan menunjuk petugas untuk melakukan tindak lanjut



penanganan kasus. Di Tahun 2022 sebanyak 39 kasus sudah selesai 100%. Hal ini berdasarkan semua kasus yang masuk sudah di tindak lanjut dan ditangani. Di Tahun 2021 tidak terdapat kegiatan respon kasus.

Respon Kasus di BBPPKS Di Bandung di tahun 2022 sebanyak 39 Kasus. Semua kasus sudah ditangani oleh Tim BBPPKS Di Bandung dengan cara melakukan kegiatan asesmen, merujuk, intervensi berupa terapi ataupun memberikan bantuan sosial. Ada beberapa kategori kasus yang masuk ke BBPPKS Di Bandung sebagai berikut :

Tabel C.1
Kategori Kasus Respon Kasus

KATEGORI KASUS					
Terlantar dan sakit parah	Pemberdayaan dan pelayanan publik	Disabilitas	Bantuan sosial	Bencana	Kekerasan, trafficking dan kasus hukum
30 kasus	2 kasus	3 kasus	1 kasus	2 kasus	1 kasus

Sumber : sikscc.kemensos.go.id

Dalam melakukan respon kasus tentunya memiliki hambatan atau kendala yang dihadapi. Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya anggaran untuk bantuan sosial respon kasus, sehingga ketika penerima manfaat membutuhkan bantuan kebutuhan dasar dan lain sebagainya Tim BBPPKS Di Bandung melakukan rujukan kepada Direktorat Terkait atau Sentra yang memiliki wilayah kerja dimana kasus itu terjadi.

Contoh kasus :

Maher Hafidz lahir pada usia kandungan 8 bulan dengan bobot 1.2 kg. Sempat dirawat di rumah sakit karena tubuhnya membiru. Pada usia 5 bulan Maher sakit dan dibawa ke Puskesmas setempat, lalu dirujuk ke RSUD Sentot Patrol, kemudian dirujuk ke RSUD Indramayu. Kemudian sakit kembali dan dibawa ke Rumah Sakit Hasna Medika Langut Indramayu, selanjutnya dirujuk ke RS Hasna Medika Cirebon, kemudian dirujuk ke RS. Harapan Kita Jakarta. Saat ini Maher berada di ICU RS Harapan Kita Jakarta dan keluarga tinggal di “Asrama Teduh” sebagai tempat singgah selama dirawat dengan pembiayaan gratis.

2. Menangani permasalahan dengan isu kasus kesehatan penyakit kronis seperti Tumor, penyakit jantung komplikasi penyakit diabetes, penyakit kusta, dan lain sebagainya yang memerlukan penanganan cepat, sehingga



mengharuskan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk penanganannya lebih lanjut. Ketika user menginginkan penanganan lebih cepat, namun dengan kondisi dilapangan harus menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, seperti masuk DTKS atau belum? memiliki BPJS PIB atau tidak? Hal ini memerlukan waktu untuk menyiapkan berkas tersebut.

Contoh kasus :

Ade Tiyah (16) Penyandang disabilitas fisik dan keterbatasan intelektual berusia 16 tahun yang menderita penyakit tumor dan mengalami stunting / kekurangan gizi sejak kecil.

Mengkoordinasikan Langkah selanjutnya untuk pemeriksaan oleh Puskesmas setempat untuk mengecek kondisi Ade Tiyah.

Mengusulkan Ade Tiyah beserta keluarga sebagai Penerima Jaminan Kesehatan melalui Anggaran APBD Kabupaten Subang.

Mengoptimalkan Usulan Keluarga Ade Tiyah untuk mendapatkan Program Bantuan Sosial Sembako atau bantuan sosial lainnya.

3. Laporan kasus yang kurang valid, misalnya siswa MIS 90 % terkategori miskin sehingga membutuhkan bantuan perlengkapan sekolah. adanya data dengan jumlah yang besar, maka diperlukan verifikasi kembali terkait penerimaan bantuan lainnya, misalnya PKH, Bantuan Siswa Miskin, KIP, kroscek pekerjaan orangtua dan kondisi rumahnya.

Contoh kasus :

Ananda Taufik Maulana (6 tahun) merupakan anak dari pasangan Ibu Rasminah dan Bapak Depen, pasangan ini saat ini sudah bercerai, Bapak Depen pergi dari rumah sehingga Ananda Taufik tinggal bersama ibu Rasminah. Ananda Taufik Maulana saat ini tidak bersekolah seperti teman teman sebayanya, hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan karena tinggal bersama ibu Rasminah yang mengalami disabilitas mental, sehingga ananda Taufik memerlukan perawatan sosial, pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, biaya sekolah, biaya kesehatan dan tempat tinggal yang layak huni karena rumah yang dihuni saat ini sangat tidak sehat untuk ditinggali. Desa Kalentambo Kec Pusaka Nagara Kab Subang

4. Akses kasus yang jauh sehingga memerlukan perjalanan yang cukup lama, misalnya kejadian bencana di Kapuas Hulu yang memerlukan perjalanan 1 (satu) hari.



Contoh kasus :

Bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu mengakibatkan kerugian berupa materil dan non materil. Kejadian bencana tersebut mengakibatkan anak kecil bernama Bilqis Aprillia 7 tahun meninggal dunia, Jl. Tanjung Pandan RT 008 Desa Kedamin hilir Kec. Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu.

Kesimpulan

Jumlah respon kasus yang masuk ke BBPPKS Di Bandung pada tahun 2022 yaitu sebanyak 39 kasus yang tersebar di 8 (delapan) kabupaten dan kota dan 2 (dua) Provinsi yaitu Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Semua kasus yang masuk sudah selesai ditangani oleh Tim BBPPKS Di Bandung baik itu dilakukan secara mandiri maupun kolaborasi dengan satker lain. Respon kasus yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Pelayanan yang dilakukan bisa berupa asesmen, rujukan, terapi, pemberian motivasi, pemberian bantuan, mencarikan *networking*, menjadi penghubung dengan *stakeholder* terkait dan lain-lain.

BBPPKS Di Bandung melakukan respon kasus target 100 % dapat tertangani. Setiap kasus yang masuk ke *command center* langsung di respon dengan cepat dengan menunjuk petugas untuk melakukan tindak lanjut penanganan kasus. Di Tahun 2022 sebanyak 39 kasus sudah selesai 100 %. Hal ini berdasarkan semua kasus yang masuk sudah di tindak lanjut dan ditangani.

Adapun yang menjadi rekomendasi dari kegiatan respon kasus adalah :

1. Dialokasikannya anggaran untuk bantuan sosial dan kebutuhan Penerima Manfaat sesuai hasil dari asesmen.
2. Kasus yang masuk ke *command center* harus terfilter sehingga mengurangi adanya kasus yang bukan tugas dan fungsi dari Kementerian Sosial.
3. Seluruh pegawai di BBPPKS Di Bandung harus memiliki *user* dan *password* **SIKSCC**, untuk memudahkan pimpinan dalam menugaskan untuk respon kasus.



2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan Publik

Sasaran strategis "meningkatnya profesionalitas dan kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial," dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian tujuan Kementerian Sosial, yaitu meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang profesional. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur melalui tiga indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang profesional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
2. Persentase lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai standar, dan
3. Persentase pemerintah daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Sasaran strategis ini didukung oleh program perlindungan sosial dan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial; Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Capaian kinerja sasaran strategis ini merupakan rata-rata dari tiga indikator yang mengukur ketercapaian sasaran ini.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja, Target, Realisasi serta Capaian BBPPKS Di Bandung.

**Tabel C.2.1 Sasaran Strategis
Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial**

No.	Indikator Kinerja	2022			2021
		Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
a.	(%) Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesejahteraan Sosial) yang memiliki Sertifikat Pendidikan, Kediklatan dan Profesi <ul style="list-style-type: none">• Jumlah peserta asesi yang mengikuti dari bimbingan teknis hingga Ujian wawancara : 2.779 orang	80 %	96,11%	120%	-



No.	Indikator Kinerja	2022			2021
		Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
	<ul style="list-style-type: none">Jumlah peserta yang tersertifikasi : 2.671 orang				
b.	(%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi <ul style="list-style-type: none">Jumlah LKS yang divisitasi : 281 LKSJumlah LKS yang tervisitasi : 278 LKS	73%	98,93%	120%	-
c.	(%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (800 Peserta)	97%	100%	103,09%	98,4%
d.	(%) Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian <i>Life Skill Training</i> bagi Penerima Manfaat (510 Peserta)	75%	100%	120%	-
Capaian Sasaran Strategis 2				115,77%	

a. (%) Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesejahteraan Sosial) yang memiliki Sertifikat Pendidikan, Kediklatan dan Profesi

Indikator ini mengukur profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tentunya perlu didukung SDM Kesejahteraan Sosial yang profesional, sehingga dapat mempercepat peningkatan taraf Kesejahteraan Sosial masyarakat. SDM yang profesional diukur dari pelaksanaan sertifikasi SDM penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.



**Gambar C.1 Alur Pelaksanaan
Sertifikasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial**



Tahapan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Penyelenggara SDM Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Di Bandung :

1. Tahapan Verifikasi

Tahapan Verifikasi Peserta Asesi di mulai pada bulan September – Oktober. Peserta Asesi dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Penyelenggara SDM Kesejahteraan Sosial berjumlah 4.000 Peserta Asesi. Adapun data awal dari BNBA Pusdiklatbangprof sebanyak 4.148 Peserta Asesi.

Dari Proses Verifikasi, didapatkan hasil sejumlah 3.190 Peserta Asesi sudah verifikasi dengan *google form* dengan rincian :

- a. 308 Peserta Asesi sudah memiliki sertifikat
- b. 2.882 Peserta Asesi belum memiliki sertifikat.

2. Tahapan Pelaksanaan

Dari jumlah peserta 3.190 orang, yang mengumpulkan Deskripsi Diri (DD) sejumlah 2.505 Peserta. Adapun Penambahan Peserta Sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial sejumlah 1.005 Orang, tetapi beberapa Peserta Asesi sudah dipanggil di Balai lain, sehingga Peserta Asesi BBPPKS di Bandung berjumlah 678 Peserta Asesi. Jumlah Keseluruhan Peserta/Asesi pada BBPPKS di Bandung : 3.560 Peserta Asesi.

3. Tahapan Intervensi

Jenis-jenis SDM Sertifikasi di BBPPKS Di Bandung Tahun 2022 antara lain :

- a. Pekerja Sosial Non ASN : 350 Peserta Asesi.
- b. Pekerja Sosial Anak : 342 Peserta Asesi.
- c. Pekerja Sosial Penyandang Disabilitas : 240 Peserta Asesi.
- d. Pekerja Sosial RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) : 93 Peserta Asesi.



- e. Pendamping Program PKH : 1.855 Peserta Asesi.
- f. Pekerja Sosial Trafficking : 21 Peserta Asesi.
- g. Pekerja Sosial KAT (Komunitas Adat Terpencil) : 12 Peserta Asesi.
- h. Pendamping Sosial : 1.235 Peserta Asesi.

Proses Penilaian

1. Penyamaan persepsi dan pemahaman bagi semua pihak panitia pelaksana, *stakeholder*, dan para calon peserta (Asesi) terkait dengan skema pelaksanaan sertifikasi, meliputi:
 - a. Proses pendaftaran peserta sertifikasi,
 - b. Proses Validasi Data Calon Peserta Sertifikasi SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - c. Proses pemanggilan peserta mengikuti Pra Pelatihan Sertifikasi (Bimtek)
 - d. Proses Pelaksanaan Ujian Kognitif dan Ujian Wawancara
 - e. Pengisian Dokumen Sertifikasi Peserta (Daftar hadir, Portofolio (CV, Deskripsi Diri) sehingga tidak ada dokumen yang salah dan tertinggal.
 - f. Proses penilaian peserta oleh Asesor LSP dan Asesor SDM.
 - g. Pengolahan nilai hasil Penilaian Portofolio (CV dan DD), ujian Kognitif dan ujian Wawancara
2. Memberikan informasi bagaimana langkah-langkah, tahapan dan proses keseluruhan pelaksanaan sertifikasi mulai dari tahap verifikasi data, pemanggilan peserta hingga selesai mengikuti proses sertifikasi.
3. Penyiapan *Data Base* hasil proses sertifikasi melalui *Google Form* untuk dokumen kearsipan, proses penjaminan mutu tahapan berikutnya, sekaligus untuk *database* dalam pemberian sertifikat bagi yang dinyatakan lulus mengikuti proses sertifikasi.

Hasil Kegiatan :

Pada pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Penyelenggara SDM Kesejahteraan Sosial, Pusdiklatbangprof memberikan *database* kepada BBPPKS Di Bandung berjumlah **4.000** Peserta Asesi. Dalam pelaksanaannya terdapat **3.190** Peserta Asesi yang mendaftar dan tambahan data sebanyak 678 Peserta Asesi.



Terdapat **3.190** orang SDM Kesejahteraan Sosial yang mengikuti uji kompetensi, terdiri dari :

- a. Pekerja sosial sebanyak **150** orang,
- b. Tenaga Kesejahteraan Sosial **2.207** orang dan
- c. Relawan sosial **314** orang.

Berdasarkan hasil uji kompetensi, dari **2.779** orang, **2.671** orang dinyatakan lulus uji kompetensi. Sehingga didapatkan angka realisasi SDM Kesejahteraan Sosial yang profesional dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2022 sebesar **96,11%**. Dengan target tahun 2022 sebesar 80%, maka diperoleh capaian **120%** atau **40%** (di atas batas capaian target).

1. Kendala

- a. Waktu pelaksanaan dan target yang harus dicapai kurang memadai
- b. Kesalahan asesori dalam memilih jenis sertifikasi sehingga menyulitkan admin dalam menentukan sertifikasi yang akan diikuti oleh asesori
- c. Alokasi waktu untuk penilaian Deskripsi Diri yang terbatas
- d. Pelaksanaan sertifikasi yang bersamaan dengan balai lain, menyebabkan kesulitan mencari asesori yang jumlahnya terbatas.
- e. Asal peserta diluar wilayah kerja BBPPKS Di Bandung sehingga menyulitkan dalam verifikasi data peserta sertifikasi.

2. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Sertifikasi dapat dilaksanakan meskipun ditemui beberapa kendala.
- b. Asesori yang mendaftar sebanyak 3.560 orang, yang mengikuti proses sertifikasi sampai akhir 2.779 orang dan yang dinyatakan kompeten sebanyak 2.671 orang.

3. Saran

- a. Waktu pelaksanaan sertifikasi harus proporsional dengan target yang harus dicapai
- b. Waktu pelaksanaan sertifikasi tidak bersamaan dengan balai lain sehingga tidak kesulitan mencari asesori



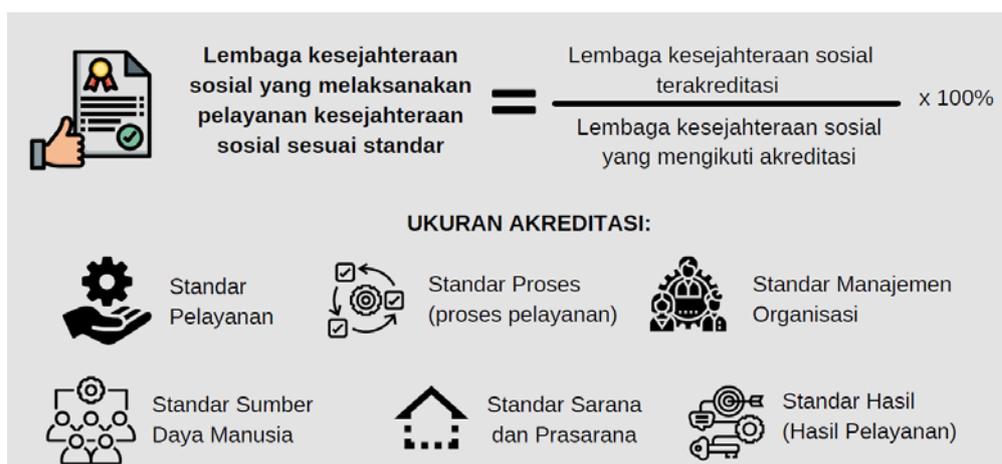
- c. Penempatan asesor sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
- d. Peserta atau asesi berasal dari wilayah kerja BBPPKS Di Bandung.
- e. Asesor yang ditugaskan untuk kegiatan wawancara sudah pasti bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Di Tahun 2021 tidak terdapat kegiatan Sertifikasi Penyelenggara SDM Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Di Bandung

b. (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi

Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, oleh karenanya dalam pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial perlu dipastikan bahwa lembaga Kesejahteraan Sosial sudah melaksanakan sesuai dengan standar. Pengukuran standar layanan lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan akreditasi, yang merupakan penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Gambar C.2 Alur Pelaksanaan Penetapan Tingkat Kelayakan Dan Standarisasi Lembaga



Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial, yang didasarkan pada penilaian 6 (enam) standar yakni standar program, sumber daya manusia, manajemen organisasi, sarana dan prasarana, proses pelayanan, dan hasil pelayanan.

Tujuan akreditasi adalah sebagai berikut :



1. Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial;
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan Kesejahteraan Sosial;
4. Meningkatkan peran aktif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pada tahun 2022, terdapat **281** lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti akreditasi dan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Akreditasi A : **7** lembaga
- Akreditasi B : **27** lembaga
- Akreditasi C : **111** lembaga
- Tidak terakreditasi : **133** lembaga

Berdasarkan hasil tersebut, maka lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai standar adalah **278** lembaga atau **98,93%**.

Dengan realisasi **98,93%** dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar **73%** maka didapatkan capaian **25,93%** di atas batas target. Mengingat angka capaian maksimal adalah **73%** maka capaian atas indikator ini adalah **120%**. Dengan capaian **120%** maka masih di atas batas target pada tahun 2022 sebesar **73%**.

Simpulan :

Simpulan dari kegiatan Pelaksanaan Visitasi Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Tahun 2022 pada wilayah kerja BBPPKS di Bandung di 19 Kabupaten/ Kota berhasil mengunjungi 281 LKS yang tersebar di 3 Provinsi. Dari LKS yang dikunjungi ada yang berhasil diakreditasi dengan keterangan akreditasi baru dan reakreditasi, masih berlaku akreditasinya, tidak dapat diakreditasi, dan tidak berkenan untuk dilakukan akreditasi.

Kendala pelaksanaan akreditasi antara lain :

1. *Data Base* Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dari Pusdiklatbangprof di wilayah kerja BBPPKS di Bandung kurang akurat.



2. Waktu pelaksanaan Akreditasi sangat terbatas karena dilaksanakan di akhir triwulan tahun 2022.
3. Keterbatasan anggaran, hal tersebut berakibat terhadap pelaksanaan Visitasi, dengan jangkauan lokasi yang terbatas pula.
4. Kurangnya ketersebaran sasaran Visitasi di wilayah kerja BBPPKS di Bandung, terutama untuk Provinsi Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.
5. Belum adanya Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Akreditasi.
Langkah-langkah perbaikan :
 - Perlu dilakukan tindak lanjut pendampingan terhadap lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah terakreditasi minimal “C” untuk meningkatkan standar pelayanan Kesejahteraan Sosial.
 - Perlu penguatan bagi seluruh lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada, terutama yang belum mendapatkan akreditasi.

Saran Kegiatan :

Berdasarkan simpulan dan kendala kegiatan diatas, maka saran untuk kegiatan Pelaksanaan Visitasi Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Tahun 2022 adalah perlu adanya data yang valid antara pusat dan daerah; diperkuatnya jaringan forum komunikasi lembaga Kesejahteraan Sosial; keterlibatan dan dukungan Pekerja Sosial dalam kegiatan pelaksanaan program Kesejahteraan Sosial; perlu adanya sosialisasi dan bimtek terkait kegiatan akreditasi LKS; pemantauan, pengawasan dan edukasi terhadap lembaga Kesejahteraan Sosial perlu ditingkatkan.

Di Tahun 2021 tidak terdapat kegiatan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Di Bandung

c. (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* bagi SDM Kesejahteraan Sosial di Bandung Tahun 2022 mempunyai maksud adalah pelatihan adalah Meningkatkan kompetensi Pendamping PKH dalam melaksanakan peran dan prinsip pendampingan dalam rangka pencegahan dan penanganan *stunting* terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), sedangkan tujuannya dapat diaplikasikannya dan dipraktekkannya pengetahuan, wawasan, dan keterampilan mengenai pencegahan dan penanganan *stunting* bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga dapat menurunkan angka *stunting* di Indonesia.

Target peserta sebanyak 800 orang, pelatihan dibagi menjadi 2 gelombang tiap gelombang terdiri 10 angkatan, dalam 1 angkatan terdiri dari 40 orang peserta. Asal peserta dari Kota/Kabupaten di wilayah kerja BBPPKS di Bandung sebanyak 4 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Lampung.

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* bagi SDM Kesejahteraan Sosial dibagi menjadi 2 periode yang terdiri dari sebagai berikut :

Tabel C.2.2
Pelatihan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* bagi SDM Kesejahteraan Sosial di Bandung Tahun Tahun 2022

NO	GEL	ANGKATAN	URAIAN		JUMLAH PESERTA	KRITERIA		KET
			ASINKRONUS	SINKRONUS		LULUS	TIDAK LULUS	
1	IV	31-40	22 Ags s.d 2 Sept 2022	5 s.d 8 Sept 2022	400	400	-	-
2	V	41-50	12 s.d 23 Sept 2022	26 s.d 29 Sept 2022	400	400	-	-
			JUMLAH		800	800	-	-

Keluaran dari pelaksanaan melalui Pelatihan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* bagi SDM Kesejahteraan Sosial Gelombang IV sampai dengan V, Angkatan 31 sampai dengan 50 antara lain

1. Terselenggaranya Pelatihan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* bagi SDM Kesejahteraan Sosial sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
2. Terdidik dan terlatihnya 800 orang Pendamping PKH melalui Pelatihan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* bagi SDM Kesejahteraan Sosial Gelombang IV sampai dengan V, Angkatan 31 sampai dengan 50.
3. Tersedianya 800 orang yang memiliki pengetahuan, wawasan dan keterampilan serta sikap yang profesional dalam pelaksanaan P2K2



sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang pentingnya pencegahan dan penanganan *stunting*.

4. Hasil yang dicapai setelah kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* bagi SDM Kesejahteraan Sosial antara lain adalah tercapainya peningkatan kualitas, kuantitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial sebagai Pendamping PKH.

Hambatan dan Kendala :

1. Pembelajaran tidak efektif dikarenakan :
 - a. Jaringan internet tidak stabil
 - b. Keterbatasan *quota*
 - c. *Server* yang tidak stabil pada saat masuk *Learning Management System (LMS)* dalam waktu bersamaan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana peserta seperti tidak punya laptop, laptop yang rusak.

Rekomendasi :

1. Kepada Dinas Sosial yang menugaskan agar tidak dibebankan tugas lain selama mengikuti pelatihan, agar dalam mengikuti pelatihan lebih fokus dan maksimal.
2. Kepada Pusdiklatbangprof dalam pembuatan modul lebih memperbanyak animasi agar pembelajaran yang lebih interaktif
3. Pelatihan diharapkan dilaksanakan secara luring, supaya lebih fokus dan hasil pelatihan bisa dipraktekan sesuai modul.
4. Kepada Pusdatin, kapasitas server perlu ditingkatkan

Di tahun 2021 terdapat **3.464** peserta yang lulus atau sebesar **98,4%** dari **3.520** peserta yang ikut kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* bagi SDM Kesejahteraan Sosial

d. (%) Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian kecakapan hidup bagi Penerima Manfaat

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha yang dilakukan Kementerian Sosial salah satunya yaitu melalui pelatihan vokasional atau pemberian keterampilan kepada PPKS (Pemerlu



Pelayanan Kesejahteraan Sosial) agar mampu hidup mandiri dan/ atau produktif. Pelatihan vokasional dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi serta mengembangkan jejaring pemasaran.

Didasarkan pada pertimbangan tersebut, pelatihan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pelatihan vokasional sangat diperlukan untuk mengembangkan kapasitas Penerima Manfaat sehingga dapat membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pelatihan ini fokus pada pengembangan usaha berdasarkan potensi sumber yang ada di daerah setempat dan menggunakan pendekatan *life skills training* atau pelatihan yang bersifat aplikatif serta langsung dipraktikkan dalam situasi yang sebenarnya untuk membentuk kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan pasar.

Peserta Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022 Angkatan I s.d XVII tahun 2022 di 17 Kota/Kabupaten Wilayah Kerja BBPPKS di Bandung, sebanyak 510 orang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel C.2.3
Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Angkatan I sd XVII

NO	KOTA/ KABUPATEN	JUMLAH PESERTA
1	Angkatan I Jakarta Timur (Sentra Mulya Jaya)	30
2	Angkatan II Kabupaten Tangerang	30
3	Angkatan III Kabupaten Bogor	30
4	Angkatan IV Kabupaten Karawang	30
5	Angkatan V Kabupaten Majalengka	30
6	Angkatan VI Kabupaten Sukabumi	30
7	Angkatan VII Kabupaten Cianjur	30
8	Angkatan VIII Kabupaten Ciamis	30
9	Angkatan IX Kabupaten Subang	30
10	Angkatan X Kabupaten Bandung Barat	30
11	Angkatan XI Kabupaten Garut	30



NO	KOTA/ KABUPATEN	JUMLAH PESERTA
12	Angkatan XII Kota Bekasi	30
13	Angkatan XIII Kabupaten Purwakarta	30
14	Angkatan XIV Kabupaten Kuningan	30
15	Angkatan XV Kabupaten Sumedang	30
16	Angkatan XVI Kota Tasikmalaya	30
17	Angkatan XVII Kabupaten Cirebon	30
	JUMLAH	510

Rekapan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat BBPPKS Di Bandung Tahun 2022 :

Tabel C.2.4
Rekapan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat BBPPKS Di Bandung Tahun 2022

No	Gel	Angkatan	Tanggal	Jumlah	Peserta	Lokasi
			Pelaksanaan	Peserta		
1	I	1	20 S.D 23 Sept 2022	30	PM Sentra Handayani & Mulyajaya	Jakarta (Sentra Mulya Jaya)
2	II	II – XI (10 AKT)	31 Okt S.D 4 Nop 2022	300	KPM PKH, BPNT	Kab. Tangerang, Kab. Bogor, Kab. Karawang, Kab. Majalengka, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Ciamis, Kab. Subang, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut
3	III	XII – XVII (6 AKT)	28 Nop S.D 2 Des 2022	180	KPM PKH, BPNT	Kota Bekasi, Kab. Purwakarta, Kab. Kuningan, Kab. Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kab. Cirebon
				510		



Materi Pelatihan :

Tabel C.2.5
Materi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
BBPPKS Di Bandung Tahun 2022

Materi dasar	Materi inti	Materi Penunjang
Mengenal Kewirausahaan Sosial	Pengenalan jenis usaha	Pengarahan Teknis
Membangun Motivasi Wirausaha	Praktik jenis usaha	Pre Test
	Pencatatan dan Pembukuan Keuangan	Post Test
	Pengemasan Produk	Evaluasi Penyelenggaraan
	Pemasaran Produk	Pembukaan dan Penutupan
	Perizinan (NIB)	
	Akses permodalan	

Jenis Pelatihan Teknis :

Tabel C.2.6
Jenis Pelatihan Teknis Pemberdayaan Masyarakat
BBPPKS Di Bandung Tahun 2022

Akt	Lokasi Kegiatan	Jenis Pelatihan Teknis
I	Jakarta	Kuliner (Nasi Rames, Dimsum, Siomay)
II	Kab. Tangerang	Kuliner (Kerupuk Ikan, Sate Bandeng)
III	Kab. Bogor	Kuliner (Bakso, Siomay, Nugget, Dimsum)
IV	Kab. Karawang	Kuliner (Bolu Kukus, Cente Manis, Kue Kering, Lapis Pelangi)
V	Kab. Majalengka	Kuliner (Keripik Talas, Keripik Singkong, Keripik Pisang, Kue Kering, Kue Basah)
VI	Kab. Sukabumi	Kuliner (Abon Jantung Pisang, Cireng Krispi, Baby Fish, Brownis Tabur Wijen, Mochi)
VII	Kab. Cianjur	Kuliner (Kecimpring, Keripik Pisang/ Lantak, Keripik Singkong dengan varian rasa)



Akt	Lokasi Kegiatan	Jenis Pelatihan Teknis
VIII	Kab. Ciamis	Kuliner (Dendeng Ikan Nila, Brownis Nila, Es Krim Nila, Puding Nila)
IX	Kab. Subang	Kuliner (Abon Ikan Air Tawar, Kerupuk Tulang Ikan, Pepes Ikan Air Tawar)
X	Kab. Bandung Barat	Kuliner (Kastengel, Kue Semprit, Nastar, Putri Salju, Cokelat Stik, Aneka Donat, Bolu Ketan Hitam Zebra, Bolu Pisang, Bolu Karamel)
XI	Kab Garut	Kuliner (Cuanki Dan Seblak)
XII	Kota Bekasi	Kuliner (Kue Basah, Risoles, Kue Ku, Minuman Herbal)
XIII	Kab. Purwakarta	Kuliner (Roti, Minuman Tradisional, Bakso Mie)
XIV	Kab. Kuningan	Kuliner (Roti Garlic, Donat Susu, Roti Unyil, Nastar, Dimsum)
XV	Kab. Sumedang	Kuliner (Pia Ubi, Talam Ubi, Risoles, Baso, Basoyaki)
XVI	Kota Tasikmalaya	Kuliner (Kue Kering, Kue Bolu, Risol)
XVII	Kab. Cirebon	Menjahit (Bantal, Tote Bag, Dompot)

Secara Keseluruhan Angkatan Hasil Pengolahan Pre Test Dan Post Test Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Diperoleh Kesimpulan Bahwa Peserta Mengalami Peningkatan Kemampuan Dan Pengetahuan.

Tabel C.2.7
Hasil Pre Test Dan Post Test
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

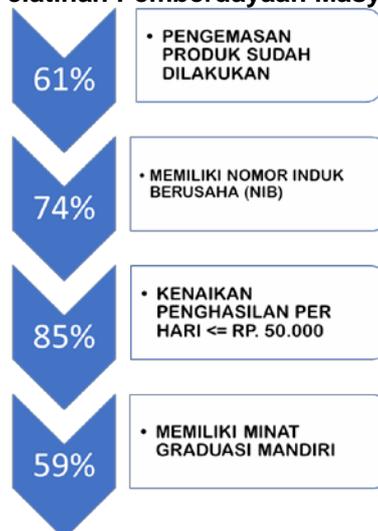
Lokasi	Jumlah Peserta	Pre Test (per peserta)	Post Test (per peserta)	Persentase kenaikan pengetahuan
Jakarta	30	11	29	96%
Kab. Tangerang	30	20	28	93%
Kab. Bogor	30	9	29	96%
Kab. Karawang	30	15	24	80%
Kab. Majalengka	30	14	26	88%



Lokasi	Jumlah Peserta	Pre Test (per peserta)	Post Test (per peserta)	Persentase kenaikan pengetahuan
Kab. Sukabumi	30	18	30	100%
Kab. Cianjur	30	21	29	96%
Kab. Ciamis	30	14	29	96%
Kab. Subang	30	17	28	93%
Kab. Bandung Barat	30	23	24	80%
Kab Garut	30	25	27	91%
Kota Bekasi	30	27	27	91%
Kab. Purwakarta	30	16	30	100%
Kab. Kuningan	30	16	29	97%
Kab. Sumedang	30	20	24	80%
Kota Tasikmalaya	30	23	30	100%
Kab. Cirebon	30	18	27	91%

Hasil Pemantauan Pasca Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat :

Bagan C.2.1
Hasil Pemantauan Pasca Pelatihan
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat





KESIMPULAN

Setelah melakukan kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022 di 17 (tujuh belas) Kota/Kab Wilayah Kerja BBPPKS di Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dapat meningkatkan kecakapan hidup penerima manfaat. Hal tersebut diperoleh dari hasil peningkatan pengetahuan peserta pada akhir pelatihan dengan perolehan kenaikan nilai persentase hasil Post Test peserta per angkatan berada di angka 80 - 100 %. Selain itu berdasarkan hasil pemantauan alumni pelatihan dari total 510 orang alumni pelatihan pemberdayaan masyarakat, telah dilakukan pemantauan terhadap 407 alumni melalui pengisian *G Form* secara dalam jaringan (daring) dan didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. 61 persen (%) alumni sudah melakukan pengemasan produk.
- b. 74 persen (%) alumni sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- c. 85 persen (%) alumni mengalami kenaikan penghasilan per hari sebesar kurang lebih atau sama dengan Rp 50,000.
- d. 59 persen (%) alumni memiliki minat untuk graduasi mandiri.

Di tahun 2021 tidak terdapat kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di BBPPKS Di Bandung.

3. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektivitas Birokrasi

Sasaran strategis "terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik," terkait dengan tujuan ketiga Kementerian Sosial, yaitu mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu: (1) nilai reformasi birokrasi, dan (2) nilai kepuasan layanan Kementerian Sosial.

Sasaran strategis ini didukung dengan program dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi; Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Capaian sasaran strategis merupakan nilai rata-rata dari dua indikator kinerja yang mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Hingga



laporan ini dibuat, satu indikator kinerja yaitu nilai reformasi birokrasi belum didapatkan, sehingga menggunakan nilai tahun 2021.

**Tabel C.3.1 Sasaran Strategis
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang
Transparan dan Akuntabel dengan melibatkan publik**

No.	Indikator Kinerja	2022			2021
		Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
a.	Nilai SAKIP BBPPKS Di Bandung	80	80,26* (Tahun 2021)	100,32	80,26
b.	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BBPPKS Di Bandung	90	92,80	103,11%	89,21
Capaian Sasaran Strategis 3				101,95	84,73

A. Nilai SAKIP BBPPKS Di Bandung

Nilai reformasi birokrasi mencerminkan kualitas perbaikan birokrasi menuju birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penilaian reformasi birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Kegiatan dimulai dengan Penilaian Mandiri (self-assessment) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan Kementerian Sosial sesuai dengan pedoman Kementerian PAN dan RB.

Penilaian reformasi birokrasi merupakan hasil komposit dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari tiga sub komponen (pemenuhan, hasil antara area perubahan dan reform), sementara komponen hasil terdiri dari empat sub komponen (akuntabilitas kinerja & keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih & bebas KKN, kinerja organisasi).

Sampai dengan penyusunan laporan kinerja BBPPKS Di Bandung Tahun 2022, belum dilaksanakan penilaian atas SAKIP BBPPKS Di Bandung Tahun 2022 sehingga untuk perbandingan nilai SAKIP BBPPKS Di Bandung Tahun 2021 sebesar 80,26 (kategori A). Apabila dibandingkan dengan target 2021



sebesar 80, didapatkan capaian 100,32%. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 83, baru didapatkan capaian 96,69%.

Langkah-langkah ke depan :

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan rencana aksi setiap agen perubahan.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya dan sudah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan yang diberikan.
- Menyelesaikan peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis secara berkala, serta optimalisasi penerapan *e-government* yang terintegrasi.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pemantauan dan evaluasi kinerja hingga level individu.
- Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas.
- Meningkatkan kualitas dari berbagai media dalam pemberian informasi yang telah dibangun.

Di tahun 2021 mendapatkan Nilai SAKIP sebesar **80,26** dengan kategori **Memuaskan (A)** dengan intepretasi memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

B. Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BBPPKS Di Bandung

Indikator ini bertujuan untuk mengukur dan mendorong peningkatan kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan Kementerian Sosial. Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Sosial kepada masyarakat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



Tingkat kepuasan publik merupakan sebuah ukuran atas seberapa berkualitas layanan publik yang diberikan Kementerian Sosial dalam memenuhi harapan para pengguna layanan.

Pada tahun 2022 masyarakat masih perlu beradaptasi dalam menghadapi lingkungan yang terpapar virus Covid-19. Terdapat protokol kesehatan yang harus diikuti termasuk oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH). Sehubungan dengan hal ini, Kementerian Sosial berupaya melakukan adaptasi kebijakan salah satunya dalam melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan STUNTING di situasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Pelatihan Pencegahan dan Penanganan STUNTING di masa AKB dilaksanakan secara Daring murni untuk meminimalisir penyebaran virus. Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan STUNTING secara daring murni dilaksanakan BBPPKS Di Bandung mulai gelombang 1 dan gelombang 2 pada tahun 2022. Untuk itu perlu dilakukan penilaian atas layanan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk survei yang diukur menjadi indeks kepuasan peserta (IKP). Tujuan survei kepuasan ini untuk mendapatkan informasi tentang kualitas penyelenggaraan yang diberikan BBPPKS Di Bandung kepada pengguna layanan. Informasi ini sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan. Sasaran survei kepuasan ini adalah terselenggaranya pelayanan yang lebih baik di masa mendatang.

Pada tahun 2022 ini, survei kepuasan unsur layanan mencakup 9 (sembilan) unsur pelayanan. Penetapan jumlah responden menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* dengan besaran sampel dan populasi sebanyak 260 responden. Total penerima layanan Pelatihan secara Daring murni pada tahun 2022 ini sebanyak 800 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan pengisian secara elektronik dengan menggunakan kuesioner elektronik/e-survei (*google form*). Teknik analisis perhitungan indeks kepuasan peserta pada kuisisioner dilakukan dengan prinsip perhitungan indeks yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 yaitu mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang



umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.

Dari total 260 responden, terdapat *range* usia dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 orang atau 0,38% berusia diantara 21-25 tahun;
2. 63 orang atau 24,23% berusia diantara 26-30 tahun;
3. 87 orang atau 33,46% berusia 31-35 tahun;
4. 72 orang atau 26,09% berusia diantara 36-40 tahun;
5. 19 orang atau 7,31% berusia diantara 41-45 tahun;
6. 13 orang atau 5% berusia diantara 46-50 tahun;
7. 3 orang atau 1,15% berusia diantara 51-55 tahun; dan
8. 2 orang atau 0,77% berusia diantara 56-60 tahun.

Sementara itu, berdasarkan pendidikan terakhir, Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir, diperoleh data dengan rincian sebagai berikut :

1. 26 orang atau 10,87% berpendidikan D1/D2/D3;
2. 12 orang atau 4,35% berpendidikan DIV;
3. 211 orang atau 79,81% berpendidikan S-1;
4. 9 orang atau 4,04% berpendidikan S-2 dan
5. 2 orang atau 0,93% berpendidikan SLTA.

Berdasarkan lokasi tempat kerja, Jumlah responden yang dalam Survei IKP BBPPKS Di Bandung Tahun 2022 berjumlah 800 peserta yang diambil berdasarkan dari Pelatihan Pencegahan dan Penanganan STUNTING dengan sample sebanyak 260 responden dari peserta diklat daring murni Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Provinsi Jawa Barat : 156 peserta atau 60%
2. Provinsi Lampung : 53 peserta atau 20,38%,
3. Provinsi Banten : 41 peserta, atau 15,77%,
4. Provinsi DKI Jakarta : 10 peserta atau 3,85%.

Penilaian unsur kuesioner **secara keseluruhan, nilai terbesar** terdapat pada kategori Tentang Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas (Widyaiswara dan Panitia Penyelenggara) dalam pelayanan penyelenggaraan pelatihan secara Daring **[U3]** yaitu sebesar **3,86**, sedangkan **nilai terkecil** terdapat pada kategori Tentang Bagaimana



pendapat Saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya penggantian yang diberikan [U7] yaitu sebesar **3,54**. Berdasarkan skoring nilai IKP pada tahun 2022, BBPPKS Di Bandung telah memberikan pelayanan dengan **kategori A (Sangat Baik)** nilai **92,80**. Berdasarkan analisa kinerja pelayanan pada tahun 2022, BBPPKS Di Bandung telah memberikan pelayanan dengan kategori A (Sangat Baik). Analisis Capaian Indikator Kinerja (IK) 3 : Indeks Kepuasan Peserta diklat terhadap pelayanan diklat pada tahun 2022 berdasarkan hasil survey terhadap 260 responden.

Tabel C.3.2
Nilai Indeks Kepuasan Peserta

Analisa Data	Nilai Unsur Pelayanan									Rata - Rata
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nilai Per Unsur	982	946	1004	937	988	980	920	972	957	965
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah kuesioner yang terisi	3,78	3,64	3,86	3,60	3,80	3,77	3,54	3,74	3,68	3,71
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0.071	0,27	0,26	0,27	0,26	0,27	0,27	0,25	0,27	0,26	0,26
IKM Unit Pelayanan Hasil Konversi	94,42	90,96	96,54	90,10	95,00	94,23	88,46	93,46	92,02	92,80

Rumus Akhir	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	TOTAL
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0.071	3,78	3,64	3,86	3,60	3,80	3,77	3,54	3,74	3,68	3,71
IKM Unit Pelayanan										92,80
Mutu Pelayanan										A
Kinerja Unit Pelayanan										Sangat Baik

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Instrumen IKP Tahun 2022



Berdasarkan Tabel 3.1, analisa kinerja pelayanan pada tahun 2022, BBPPKS Di Bandung telah memberikan pelayanan dengan kategori A (Sangat Baik).

Tabel C.3.3
Grade Nilai Unsur

No.	Grade Unsur	Nilai	Nomor Unsur	Keterangan
1.	Terkecil	3,54	U7	Tentang Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya penggantian yang diberikan?
2.	Terbesar	3,86	U3	Tentang Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas (Widyaiswara dan Panitia Penyelenggara) dalam pelayanan penyelenggaraan pelatihan secara Daring?

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Instrumen IKP Tahun 2022

Berdasarkan informasi tersebut, penilaian unsur di BBPPKS Di Bandung dapat dianalisis sebagai berikut : Penilaian unsur kuesioner **secara keseluruhan, nilai terbesar** terdapat pada kategori Tentang Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas (Widyaiswara dan Panitia Penyelenggara) dalam pelayanan penyelenggaraan pelatihan secara Daring **[U3]** yaitu sebesar **3,86**, sedangkan **nilai terkecil** terdapat pada kategori Tentang Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya penggantian yang diberikan **[U7]** yaitu sebesar **3,54**.

Rekomendasi

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Pusdiklatbangprof) :
 - a. Membuat video tutorial penggunaan LMS;
 - b. Mengeluarkan ketetapan biaya pelatihan berbasis daring pada komponen uang saku dan paket pulsa untuk kegiatan asinkronus dan sinkronus;
 - c. Mereviu dan menyederhanakan modul termasuk video agar lebih aplikatif, efektif dan efisien;
2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial :
 - a. Menyediakan server yang digunakan khusus untuk pelatihan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Memberikan akses kepada peserta untuk mengunduh Video Pembelajaran di LMS



3. Direktorat Jaminan Sosial (JS) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) : Membuat Surat Edaran kepada SDM PKH yang sudah mengikuti pelatihan pencegahan dan penanganan stunting untuk fokus mengimplementasikan hasil pelatihan untuk disampaikan kepada KPM
4. BBPPKS Di Bandung menginisiasi kesepakatan antara Direktorat JS, Dinas Sosial Kab./Kota dan Pusdiklatbangprof untuk tidak memberikan tugas lain kepada pendamping sosial selama mengikuti Pelatihan.

Di tahun 2021, BBPPKS Di Bandung mendapatkan nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat** sebesar **89,21** dengan mutu pelayanan **A** dan Kinerja Unit Pelayanan **Sangat Baik**.

D. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan Dukungan manajemen dan tugas lainnya merupakan kegiatan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan di BBPPKS Di Bandung, sebagai berikut:

1) Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 layanan

Layanan Dukungan manajemen Satker (1 layanan) Layanan sarana dan prasarana Internal meliputi lima kegiatan, yaitu:

a) Sarana Prasarana

Layanan sarana dan prasarana Internal meliputi dua kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perkantoran
2. Kegiatan Renovasi Gedung / Kantor

Layanan sarana dan prasarana, tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel D.1
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Layanan

No.	Kegiatan	Satuan	Volume 2021	Volume 2022
1.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor			
	a. PC Komputer	Unit	15	15
	b. Laptop	Unit	20	20
	c. Printer Warna, Copy dan Fa	Unit	15	15
	d. Audio Visual Aid	Unit	2	2
	e. Sound System	Unit	7	7
	f. Moveable Arsip	Unit	2	2
	g. Mesin Penghancur Kertas	Unit	4	4
	h. Mesin Penghitung Uang	Unit	1	1
	i. Printer Portabel	Unit	5	5
	j. Camera DSLR	Unit	5	5



No.	Kegiatan	Satuan	Volume 2021	Volume 2022
	k. Handy cam	Unit	2	2
	l. TV Led 32"	Unit	5	5
	m. Kulkas	Unit	5	5
	n. Flip Chart	Unit	1	1
	o. Tape Recorder	Unit	2	2
	p. Laser Pointer	Unit	5	5
	q. Handy Talky	Unit	10	10
	r. Megaphone	Unit	1	1
	s. Lemari File	Unit	10	10
	t. Filling Cabinet	Unit	10	10
	u. CCTV	Unit	4	4
	v. Finger Print	Unit	1	1
2.	Renovasi Gedung Kediklatan	M2	1.263,00	1.263,00

Sumber Data: Aplikasi SIMAN Tanggal 31 Desember 2022

- b) Penyusunan rencana program dan anggaran
- c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- d) Pengelolaan keuangan dan pembendaharaan
- e) Pengelolaan kepegawaian
- f) Pelayanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan

E. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Apabila capaian kinerja lebih tinggi dengan realisasi anggaran maka sudah dapat disimpulkan bahwa efisien.

**Tabel Analisis Efisiensi
BBPPKS Di Bandung**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
1.	(%) Penerima Pelayanan ATENSI yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100	99,77
2.	(%) Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesejahteraan Sosial) yang memiliki Sertifikat Pendidikan, Kediklatan dan Profesi <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah peserta asesi yang mengikuti dari bimbingan teknis hingga Ujian wawancara : 2.779 orang • Jumlah peserta yang tersertifikasi : 2.671 orang 	120	78,87
3.	(%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah LKS yang divisitasi : 281 LKS • Jumlah LKS yang tervisitasi : 278 LKS 	120	97,88



4.	(%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (800 Peserta)	103,09	99,92
5.	(%) Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian <i>Life Skill Training</i> bagi Penerima Manfaat (510 Peserta)	120	97,87
6.	Nilai SAKIP BBPPKS Di Bandung	100,32	97,45
7.	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BBPPKS Di Bandung	103,11	99,67

Dari 7 sasaran kegiatan yang ditetapkan, capaian kinerjanya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran, sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran BBPPKS Di Bandung sudah efisien

F. Realisasi Anggaran

Pada tahun Anggaran 2022 BBPPKS Di Bandung telah mengalami beberapa revisi. Revisi ini dilakukan Terkait dengan *refocusing* anggaran akibat adanya perubahan SOTK dan Nomenklatur.

Realisasi anggaran Tahun 2022, terjadi pada tabel di bawah ini.

Tabel E.1
Realisasi Anggaran Tahun 2022
Per 31 Desember 2022

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Sisa (Rp)
Pegawai	3,399,278,000	3,344,920,847	98.40%	54,357,153
Barang	6,991,098,000	6,715,820,257	96.06%	275,277,743
Modal	-	-	-	-
Jumlah	10,390,376,000	10,060,741,104	96.83%	329,634,896

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN Tanggal 31 Desember 2022



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun. Untuk itu BBPPKS Di Bandung sebagai unit akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial dipandang perlu setiap akhir tahun anggaran untuk menyusun LAKIN sebagai bentuk atau perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Pada Tanggal 02 Februari Tahun 2022 terdapat Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang menetapkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sehingga Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam mengimplementasikan peran tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, BBPPKS melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial aparatur dan masyarakat
- c. Pelaksanaan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
- d. Pelaksanaan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan masyarakat
- e. Pelaksanaan pengendalian mutu Pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial
- f. Pelaksanaan advokasi dan asistensi serta Kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
- h. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, BBPPKS menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.



Berdasarkan hasil capaian kinerja BBPPKS Di Bandung di Tahun 2022, terdapat pencapaian DIPA sebagai berikut :

1. BBPPKS Di Bandung melakukan respon kasus **target 100%** dapat tertangani. Setiap kasus yang masuk ke command center langsung di respon dengan cepat dengan menunjuk petugas untuk melakukan tindak lanjut penanganan kasus. Ditahun 2022 sebanyak **39 kasus** sudah selesai **100 %**,
2. Terdapat **3.190** orang SDM Kesejahteraan Sosial yang mengikuti uji kompetensi, terdiri dari :
 - a. Pekerja sosial sebanyak **150** orang,
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial **2.207** orang dan
 - c. Relawan sosial **314** orang

Berdasarkan hasil uji kompetensi, dari **2.779** orang, **2.671** orang dinyatakan lulus uji kompetensi. Sehingga didapatkan angka realisasi SDM Kesejahteraan Sosial yang profesional dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2022 sebesar **96,11%**. Dengan target tahun 2022 sebesar **80%**, maka diperoleh capaian **120%** atau **40%** (di atas batas capaian target).

3. Terdapat **281** lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti akreditasi dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Akreditasi A : **7** lembaga
 - b. Akreditasi B : **27** lembaga
 - c. Akreditasi C : **111** lembaga
 - d. Tidak terakreditasi : **133** lembaga

Berdasarkan hasil tersebut, maka lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai standar adalah **278** lembaga atau **98,93%**.

Dengan realisasi **98,93%** dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar **73%** maka didapatkan capaian **25,93%** di atas batas target. Mengingat angka capaian maksimal adalah **73%** maka capaian atas indikator ini adalah **120%**. Dengan capaian **98,93%** maka masih di atas batas target pada tahun 2022 sebesar **73%**.

4. Tercapainya peningkatan kualitas, kuantitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial sebagai Pendamping PKH dengan terdidik dan terlatihnya 800 orang atau 100% Pendamping PKH melalui Pelatihan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* bagi SDM Kesejahteraan Sosial Gelombang IV sampai dengan V, Angkatan 31 sampai dengan 50.



5. Mengembangkan kapasitas Penerima Manfaat sehingga dapat membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan berupa Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022 Angkatan I s.d XVII tahun 2022 di 17 Kota/Kabupaten Wilayah Kerja BBPPKS di Bandung, sebanyak 510 orang.
6. Nilai reformasi birokrasi BBPPKS Di Bandung tahun 2021 adalah 80,26 dengan Kategori A (Memuaskan), hingga laporan dibuat belum didapatkan hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB, sehingga menggunakan nilai reformasi birokrasi tahun 2021 sebesar 80,26 (kategori A). Apabila dibandingkan dengan target 2021 sebesar 80, didapatkan capaian 100,32%.
7. Berdasarkan skoring nilai IKP pada tahun 2022, BBPPKS Di Bandung telah memberikan pelayanan dengan kategori A (Sangat Baik) nilai 92,80.
8. Realisasi keuangan yang dicapai dari jumlah anggaran yang dikelola BBPPKS Di Bandung Tahun 2022 dari Pagu Rp.10,655,968,000,- sebesar Rp.10,609,820,050,- (99.57%).

Untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di masa yang akan datang maka seluruh sumber daya yang ada di BBPPKS Di Bandung akan mengoptimalkan program-program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di lingkungan BBPPKS Di Bandung melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya serta melaksanakan evaluasi berbasiskan pada kompetensi yang bersangkutan
2. Melakukan komunikasi, merumuskan tanggung jawab dan tugas yang harus dicapai oleh pegawai di lingkungan BBPPKS Di Bandung dan disepakati bersama melalui perjanjian dengan penandatanganan Pakta Integritas
3. Melaksanakan evaluasi berbasiskan pada kompetensi dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi tentang tinggi rendahnya atau baik buruknya kinerja setiap pegawai di lingkungan BBPPKS Di Bandung yang akurat untuk mendukung organisasi.



Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) BBPPKS Di Bandung 2022 untuk dievaluasi oleh APIP Kementerian Sosial. Semoga apa LAKIN ini benar-benar mencerminkan kinerja BPPKS Bandung yang akuntabel.